

**REAKSI TAIWAN ATAS DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
ANTI PEMISAHAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT
CINA**

**(Taiwan Reaction On Anti Secession Law Ratification by The Government of The
People's Republic of China)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Muhammad Fikri Diponegoro

2000 051 0012

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**REAKSI TAIWAN ATAS DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG ANTI
PEMISAHAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CINA**

**(Taiwan Reaction On Anti Secession Law Ratification by The Government of The
People's Republic of China)**

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Fikri Diponegoro
Nomor Mahasiswa : 2000 051 0012



Skripsi ini telah dipertahankan dalam Ujian Pendadaran, dinyatakan LULUS dan
DISAHKAN di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 10 juli 2008
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang HI A

Tim Penguji

Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si.
(Ketua Penguji)

Dr. H. Tulus Warsito, M.Si.
(Penguji Samping I)

Drs. Husni Amriyanto Putra, M.Si.
(Penguji Samping II)

HALAMAN MOTTO

You'll Never Know Until You Try

Never Surrender

Look At The Bright Side

*“ kemudian apabila kamutelah membulatkan tekad, maka bertawakal lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”
(QS. Ali Imran : 159)*

“ Tetapi (ikutilah Allah), Allah-lah Pelindungmu dan Dia-lah sebaik-baiknya Penolong”, (QS. Ali Imran : 150)

Orang Berilmu tanpa Iman akan tersesat, Orang beriman tanpa ilmu akan disesatkan

Tabah dalam menerima kekalahan dan menunggu waktu yang benar-benar tepat untuk melakukan perhitungan atas kekalahan-kekalahan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala nikmat yang sangat luar biasa, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan, pertolongan dan ridho-Nya di setiap langkah-langkah hidupku karena Dia-lah sebaik-baiknya penolong
- ❖ Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan inspirasi dalam proses perjalananku atas makna hidup yang sebenarnya
- ❖ Papa (dr. H. Masrifan Djamil, MPH, M.Kes.) dan Mama (Ismiati Arini, SH) tercinta yang telah memberikan segenap kasih sayang, kesabaran, dukungan dan do'a yang tiada henti kepada *Mas Fikri* sehingga sampai kapanpun Ananda tak akan mungkin sanggup membalasnya.
- ❖ Adik pertama (Isna Rahmia Fara, S.Ked.) dan Adik kedua (Isma Sakti Haninaila) tersayang terima kasih atas segenap kesabaran, perhatian dan dukungannya, semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang berbakti.
- ❖ Mbah Bapak di Semarang dan Mbah Djamil+Mbah Parti di Jepara. Cucumu sebentar lagi wisuda, sabar ya mbah...

- ❖ Mbah Ibuk Semarang dan Mbah Rayi Jepara yang sudah dipanggil pulang. Cucumu banyak salah, suka bandel, sekarang sudah selesai kuliah. Semoga Diberikan Ampunan, Rahmat dan tempat yang paling layak oleh ALLAH SWT.
- ❖ Asri Yunia Sari, di saat terakhir masa belajarku menjadi pengisi yang “bebas aktif”, sehingga kangmas-mu bisa segera lulus. Aku Sayang kamu.
- ❖ M. Yudi Eko, (C)S.IP, Jamaluddin, Ainul Alim, M. Na’im, Zulfikri Nawawi, Harits Dwi Wiratma, M. Yusra, teman-temanku yang paling kuingat. Dukungan dari kalian lebih tulus dari yang pernah kurasakan, Terima kasih.
- ❖ Dimas Prima Wibawa, S.IP. Berawal bersama, berakhir bersama secara tidak sengaja. God Works in a mysterious way. Makasih ya Dek...
- ❖ KOMAHI dan Keluarga Alumni Pengurus KOMAHI yang setia mendengarkan cerita konyol orang tua satu ini, masih sebagai keluarga, terima kasih yang tiada henti, terutama pemerintahan 2002-2003, yang membuatku menjadi seperti sekarang.
- ❖ Pak Sugeng, maaf pak kalo saya ada salah sama bapak, tidak pernah bisa cepat ketika disuruh ngerjakan. Terima kasih banyak ya pak..
- ❖ Teman-teman angkatan 2000, Eep, Acep, Agus, Eci, Adit, Sofyan. Semoga kalian mendapatkan rejeki yang luas, hidup yang barokah.

- ❖ Weny Dyah Marlia, 4 tahun kamu menjadi bagian integral hidupku.
Maaf tidak bisa cepat lulus dulu.
- ❖ Hardini Setyowati, kakakku yang Gokhiil, setia menemani dalam
kebujaan..
- ❖ Mas Eri Singkawang, Klien, motivator, terima kasih membuatku sadar
siapa aku, apa yang kupunyai, apa yang harus kulakukan dengan itu,
menjadikan hidup ini semudah yang dibayangkan...
- ❖ Banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini karena
berbagai keterbatasan. Mohon maaf, Terima kasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**REAKSI TAIWAN ATAS DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CINA**”. Salam serta shalawat tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia di dunia.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak hal yang dapat penulis peroleh. Hal ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini :

- ❖ Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ❖ Bapak Dr. Tulus Warsito selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ❖ Ibu Grace Lestariana Wonoadi, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
- ❖ Bapak Sugeng Riyanto, S.IP, M.Si selaku pembimbing sekaligus penguji I.
- ❖ Bapak Dr. Tulus Warsito selaku Dosen Penguji Skripsi II.
- ❖ Bapak Drs. Husni Amriyanto Putra, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi II.
- ❖ Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ❖ Bapak Jumari yang selalu sabar dan tersenyum meskipun dalam keadaan lelah.
- ❖ Papa dan Mama tercinta yang telah berperan besar dalam perjalanan hidupku dengan segenap kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa semoga kelak Ananda dapat menjadi kebanggaan Papa dan Mama.

- ❖ Adik-adikku tercinta terima kasih atas segala dukungan, do'a dan perhatian kalian berdua sehingga memberikan semangat yang besar.
- ❖ Seluruh Keluarga besar di Semarang, Jepara dan Banjarnegara, terima kasih atas do'anya.
- ❖ Asri Yunia Sari, tarima kasih karena telah menjadi dorongan yang hebat.
- ❖ M. Yusra, Dimas Prima Wibawa, Ainul Alim dan M. Na'im sahabatku terima kasih atas segala kesabaran mampu meyakinkan bahwa aku akan bisa melewatinya, semoga kita di beri jalan menuju kesuksesan, Amin.
- ❖ Mas Eri, klien dan motivator yang benar-benar merubahku.
- ❖ Zulfikri Nawawi yang selalu memberi hiburan jauh-jauh datang dari Pontianak.
- ❖ Adikku Faridh, terima kasih atas untuk keceriaannya selama ini, berjuanglah demi masa depanmu.
- ❖ KOMAHI ku tercinta, akan selalu kucatat dan kuingat sepanjang hidup sebagai sejarah yang manis karena di KOMAHI-lah aku jadi seseorang, semoga akan menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan.
- ❖ Teman-teman KOMAHI 2000: Gusrianto, Niken, Anti, Isme, Ika, Eep, Acep, Yudi Papua, Yamin, dkk. Terima kasih.
- ❖ Teman-teman KOMAHI angkatan junior.
- ❖ Teman-teman Griya Banyuraden.
- ❖ Rekan-rekan alumni dan mahasiswa HI UMY.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di berbagai aspek, namun di balik kekurangan tersebut penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga pembaca sehingga dapat menjadi pembelajaran dan manfaat di masa yang akan datang, amin ya Rabbal 'alamin....

Yogyakarta, 28 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Tujuan Penelitian	1
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Perumusan Masalah	8
E. Kerangka Dasar Teori	8
F. Hipotesa	22
G. Metode Penelitian	22
H. Jangkauan Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II HUBUNGAN REPUBLIK RAKYAT CINA DENGAN TAIWAN	
A. Sejarah Hubungan Cina dan Taiwan	26
1. Sebelum 1895	26
2. 1895 – 1949	30
3. 1945 – Sekarang	34
B. Bentuk-bentuk Hubungan Luar Negeri Cina dan Taiwan	42
BAB III UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA	
A. Latar Belakang	47
B. Isi Undang-Undang Anti Pemisahan	53

**BAB IV TINDAKAN TAIWAN MENGHADAPI UNDANG-UNDANG ANTI
PEMISAHAN**

A. Mencari Dukungan dari Eropa	65
B. Pernyataan Pemerintah	67
C. Pendapat Publik	82

BAB V KESIMPULAN 89

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berkembangnya perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah fenomena yang membahayakan menurut dunia barat. Hal tersebut menjadi poin positif bagi dunia ekonomi RRC khususnya. Namun lain halnya dengan pengaruhnya terhadap dunia luar, ia dianggap sebagai ancaman serius. Kemajuan ekonomi yang sangat pesat secara otomatis akan menaikkan tingkat *deterrence*¹ suatu negara. Terbukti dengan disahkannya RUU Anti Pemisahan (*Anti-Secession Law*) oleh parlemen RRC pada bulan Mei 2005. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa isu tersebut adalah sebuah fenomena yang perlu diteliti. Penulis mengambil judul **“Reaksi Taiwan atas disahkannya Undang-Undang Anti Pemisahan oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina”**.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana reaksi Taiwan atas disahkannya RUU Anti Pemisahan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina
2. Mengetahui lebih jauh apa tujuan dibalik pengesahan RUU Anti Pemisahan.

¹ Mas'ood, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi*, 1989, PAU-Studi Sosial, Yogyakarta; hal. 105

C. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu kala, perdebatan diantara bangsa Cina mengenai wilayah Taiwan tidak ada habisnya. Perdebatan mengenai apakah Taiwan termasuk bagian dari Pemerintahan RRC ataukah harus berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Republik Cina, secara resmi dikenal dengan nama *Republic of China* (RoC), adalah republik konstitusional pertama di Asia. RoC dibentuk pada tahun 1912 menggantikan kekaisaran Dinasti Qing sekaligus mengakhiri kekuasaan imperial Cina yang berlangsung lebih dari 2000 tahun.

Setelah menggantikan kekaisaran yang berkuasa, RoC menjadi republik yang paling lama bertahan di Asia Timur. Kekuasaan RoC pada waktu itu terancam oleh dua peperangan, antara lain invasi Jepang sebagai salah satu “pelaku” Perang Dunia II (PD II) dan juga perang saudara. Sampai pada akhirnya Partai Komunis Cina (PKC) pimpinan Mao Zedong memenangkan perang saudara dan memproklamirkan Negara baru Republik Rakyat Cina di Beijing pada tanggal 1 Oktober 1949. Pertempuran perang saudara yang paling besar tersebut berakhir tahun 1950 dengan hasil PKC mendapatkan kekuasaan atas wilayah daratan Cina. Pemerintah RoC, dipimpin oleh partai Kuomintang (KMT) yang berkuasa sejak 1928 harus melarikan diri ke Kepulauan Taiwan dan mengklaim wilayah Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai Cina seperti Kinmen, Penghu dan Matsu.

Sejarah kedua negara digunakan secara selektif baik untuk mendukung unifikasi ataupun kemerdekaan Taiwan. Nampaknya sudah jelas bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina sejak berabad lalu walaupun selama itu Cina tidak memanfaatkan kekuasaannya atas Taiwan. Namun disamping itu juga ada indikasi kearah kemerdekaan. Hal ini terlihat dalam dua periode, periode Koxinga (Cheng Cheng-Gong) pada masa dinasti Qing dan periode Chiang Kai-Sek pada abad ke-20. Perlawanan menghadapi pemerintah pusat lebih kepada menentang kekuasaan pemerintahan PKC yang berhaluan Komunis daripada perjuangan untuk kemerdekaan.

Sedangkan dalam hal hubungan lintas selat, kedua negara lebih memilih melakukannya melalui agen-agen khusus di luar kementerian luar negeri masing-masing. Mainland Affairs Council (MAC) milik pemerintah Taiwan misalnya, walaupun secara politik RRC dan Taiwan berseteru namun mereka tetap menjalin hubungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Terdapat tujuh faktor yang menjadi pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan dalam hubungan lintas selat yaitu faktor sejarah, kebudayaan, geografi, hukum, politik, ekonomi dan keamanan.² Empat faktor yang pertama secara umum penekanannya tidak lebih besar dari faktor politik, ekonomi dan keamanan, tetapi tetap muncul sebagai bagian justifikasi yang sering dipakai dalam debat-debat masalah kemerdekaan melawan unifikasi. Dalam berbagai kasus faktor-faktor tersebut muncul untuk menjadi pembenaran bagi

² www.wikipedia.com/Taiwan-China/relations ; access date: November 2006

masalah kemerdekaan Taiwan atau sebaliknya sebagai dasar klaim RRC untuk unifikasi. Namun demikian faktor sejarah, kebudayaan dan geografi bukanlah faktor pencetus gerakan-gerakan tersebut diatas. Lain dengan faktor hukum, faktor ini menjadi katalis dalam penyusunan sebuah keadaan adanya pergerakan. Faktor Politik, ekonomi, dan keamanan terutama militer memberikan arah perubahan terhadap isu-isu yang berkembang.

Dari faktor geografis, kedua negara ini dipisahkan oleh selat Taiwan (*Taiwan Strait*). Hal inilah yang diperkirakan memunculkan klaim Taiwan atas legalitas pemerintahan mereka. Selain dipisahkan oleh Selat Taiwan, sistem yang mereka anut sangat bertolak belakang, RRC dengan Komunisme sementara Taiwan dengan Nasionalisme. Oleh karena itu permasalahan unifikasi menjadi masalah yang sangat sensitif.

Pembangunan sistem pertanian dan perkebunan dan juga sistem perdagangan menjadikan Taiwan wilayah yang maju dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an pemerintah melakukan reformasi ekonomi dengan memberantas korupsi dan mereformasi kebijakan-kebijakan tanah. Gerakan ini seiring dengan masa gemilang pertumbuhan ekonomi walaupun terdapat ancaman perang sipil dan ketidakpuasan rakyat. Kemudian dalam pembangunan politik modern, saat ini Taiwan telah menjadi negara penganut sistem demokrasi yang bersemangat. Dalam hal pembangunan demokrasi, iklim politik berubah di tahun 80-an dan 90-an ketika

pemerintah secara aktif melakukan gerakan perubahan menuju sistem demokrasi. Dimulai dengan dirilisnya UU Militer tahun 1987 disusul dengan dikeluarkannya rangkaian reformasi politik untuk memperluas proses demokrasi. Proses demokratisasi ini dilanjutkan dengan diadakannya pemilihan presiden pertama pada tahun 1996, kemudian pemilihan presiden pada tahun 2000 yang dengan terpilihnya Chen Sui-bian sebagai presiden dari Partai Demokrat Progresif (DPP) mengakhiri pemerintahan KMT selama 50 tahun³. Sejalan dengan itu, pembicaraan-pembicaraan masih terus dilangsungkan untuk mencari celah guna mengakhiri konflik selama hamper lima dekade terakhir.

Konflik politik Taiwan dengan RRC juga berlangsung di level internasional antara lain di berbagai organ Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan di Majelis Umum PBB sendiri. Taiwan pernah menjadi anggota tetap PBB namun akhirnya pada Oktober 1971, RRC mengambil kursi keanggotaan Taiwan di PBB menyusul dikeluarkannya resolusi PBB nomor 2758 yang memberikan keanggotaan kepada RRC. Setelah kejadian tersebut banyak negara-negara besar merubah pengakuan diplomatik mereka ke RRC, menerima dan mengakui bahwa RRC adalah satu-satunya pemerintahan yang mempunyai legitimasi atas semua wilayah Cina. Sementara itu Taiwan menjalin hubungan diplomatik dengan 24 negara, kebanyakan adalah negara-negara Amerika Tengah, Afrika, dan negara-negara dunia ketiga.

³ http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Republik_China&printable=yes ; access date: November 2006

Sampai sekarang hanya negara-negara tersebut saja yang mengakui kedaulatan Taiwan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Pada saat yang sama RRC yang telah mengukuhkan keanggotaan permanennya di Dewan Keamanan PBB memanfaatkan posisinya untuk menghalangi partisipasi, kemerdekaan dan pengakuan untuk Taiwan. Kenyataannya, RRC tanpa lelah terus mengancam usaha-usaha Taiwan untuk memainkan peran yang baik dalam urusan komunitas global. Salah satu contoh kasus mengenai masalah ini yaitu ketika diadakannya Konferensi Internasional Pemberantasan Pandemi Flu Burung dan Manusia di Beijing pada bulan Januari 2006. RRC menolak untuk mengundang perwakilan Taiwan untuk ikut serta. Konferensi tersebut diselenggarakan bersama dengan Komisi Eropa dan Bank Dunia. Padahal Taiwan pernah diundang ke konferensi serupa, termasuk yang diselenggarakan oleh WHO di Jenewa pada bulan November 2005 dan di Tokyo pada Januari 2006. Kemudian sejak Taiwan bergabung dengan WTO pada Januari 2002, Cina secara terus menerus menekan sekretariat WTO untuk menurunkan status perwakilan Taiwan dari *Permanent Mission* atau keanggotaan permanen ke keanggotaan ekonomi dan perdagangan.

RRC mengejutkan dunia internasional karena perkembangan ekonominya yang bombastis. Sementara memang masih terjadi kemiskinan yang parah di negara tersebut yang menelan biaya sebesar US\$ 1,4 Milliar dari bantuan pemerintah pada tahun 2004, sebanyak US\$ 25 Milliar dialokasikan untuk pengeluaran sektor pertahanan hanya untuk tahun 2004 saja, naik tajam sekitar 46% sejak 2001. Selain itu sebanyak US\$ 1,6 Milliar dianggarkan untuk Olimpiade Beijing 2008. Kemudian

sekitar US\$ 3,15 Milliar sedang dikeluarkan untuk membangun gedung kaca raksasa didekat lapangan Tian An Men karena pemerintah merasa bahwa Cina sebagai negara yang besar membutuhkan gedung teater modern agar sebanding dengan statusnya sebagai negara besar⁴.

Kemajuan ekonomi Cina yang sangat luar biasa ini sangat mengkhawatirkan terlebih bagi Taiwan yang telah lama mempunyai konflik dengan Cina, dan juga negara-negara yang mempunyai kepentingan di Taiwan. Setelah menaikkan anggaran untuk kemiskinan, lalu anggaran penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008, menyusul kemudian pemerintah RRC menaikkan anggaran pertahanan dan dilanjutkan dengan dirilisnya RUU Anti Pemisahan pada Maret 2004. RUU anti-pemisahan (secara bahasa RUU Anti Pemisahan Negara) adalah hukum milik RRC, dan akhirnya diratifikasi oleh Komisi III dalam Kongres Rakyat Nasional ke-10 RRC pada bulan 14 Maret 2005.

Beragamnya reaksi dari banyak negara di dunia menarik sekali untuk dicermati karena mereka nampaknya lebih memilih untuk mendukung kemerdekaan Taiwan (*sovereignty*) sementara menjalin hubungan diplomatik dengan Cina daripada mendukung UU Anti Pemisahan tersebut. Disahkannya UU tersebut dikhawatirkan akan membawa kepada sebuah konflik baru terutama di kawasan Asia timur. Selain itu ada pula kemungkinan bahwa banyak sekali kepentingan negara-negara lain terutama Amerika Serikat di Taiwan sehingga mereka merasa harus melindungi

⁴ Yan, Li Yong, *China, One System, two Chinas*, Asia Times Online Ltd; 2004. retrieved from www.wikipedia.com ; access date: March 21st 2007

Taiwan. Yang menarik adalah mereka bermaksud melindungi Taiwan, namun bersamaan dengan itu mereka berhubungan baik dengan Cina.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah pertanyaan :

Bagaimana reaksi Taiwan terhadap UU Anti Pemisahan Pemerintah Republik Rakyat Cina?

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan teori-teori yang menjadi pegangan pokok secara umum. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi, berteori adalah “pekerjaan penonton”; yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.⁵ Selain itu, teori juga menuntun kita mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Politik Luar Negeri adalah salah satu sarana untuk melakukan penjelasan teoritik yang komprehensif untuk memahami perilaku politik sebuah negara. Dalam kasus ini, untuk menjelaskan bagaimana reaksi Taiwan terhadap disahkannya UU Anti Pemisahan tersebut akan menggunakan tipologi politik luar negeri John Lovell.

⁵ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodolgi*, Jakarta LP3ES, 1990, hal.185

Tipologi ini akan menjelaskan apa strategi Taiwan dalam menyikapi UU Anti Pemisahan tersebut. Selain menggunakan tipologi tersebut, juga akan dianalisa menggunakan model Aktor Rasional milik Graham T. Allison.

Bagaimanapun luasnya penelaahan perilaku politik Taiwan berkaitan dengan UU tersebut, pada batasan politik luar negeri merupakan tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan. Suatu mekanisme bagi sebuah politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya.⁶

Kebijakan Luar Negeri seperti diungkapkan oleh Jack C. Plano Roy Olton dirumuskan sebagai berikut:

“Foreign Policy is strategy of plan course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest”.

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Sedangkan kepentingan nasional didefinisikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai berikut:

”The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state most vital needs.

⁶ Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 25.

*These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being”.*⁷

I. Tipologi strategi Politik Luar Negeri

Tipologi adalah sistem klasifikasi atau sistem kategori, bukan sistem teoretik. Tipologi terdiri dari sistem kategori yang dibangun untuk mengorganisasikan hasil pengamatan sehingga hubungan antar kategori bisa dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk membuat skema yang tertib untuk mengklasifikasi dan mendeskripsikan fenomena. Tipologi atau taksonomi umumnya tidak berfungsi eksplanasi, namun hanya sarana deskripsi.⁸

Dinyatakan oleh John Lovell bahwa keputusan Politik Luar Negeri dibuat sebagai tanggapan terhadap kejadian dan masalah yang terjadi atau yang diantisipasi akan terjadi di lingkungan internasional. Hal ini tentu saja membutuhkan semua informasi mengenai apa yang terjadi di dunia.

Kemudian, tipologi strategi Politik Luar Negeri ini dapat mengkaji tipe strategi yang diambil suatu negara. Dan dapat dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mengenai kemampuan sendiri. Disini terdapat empat dimensi,

⁷ Jack C Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, Holt Rinehart, Winston inc., Western Michigan University, New York, 1973, p. 127

⁸ Mas'oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi*, 1989, PAU-Studi Sosial, Yogyakarta: hal. 88

jika semuanya dipertemukan silang menghasilkan empat tipe strategi: konfrontatif, memimpin (*leadership*), akomodatif, dan konkordan.

Gambar 1.1

Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

PERKIRAAN KEMAMPUAN SENDIRI		PENILAIAN TENTANG STRATEGI LAWAN	
		Mengancam	Mendukung
	Lebih Kuat	Konfrontasi	Memimpin
	Lebih lemah	Akomodasi	Konkordans

Sumber: John Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinchart, Winston, 1970), hal. 99.

Menurut Kamus Ilmiah Populer Internasional tahun 2005, Pengertian Konfrontasi adalah (keadaan) saling menentang/saling bertentangan; Akomodasi adalah penyelesaian (mengenai perselisihan), sedangkan Konkordan adalah (keadaan atau kondisi) dalam keselarasan, seimbang, selaras atau dengan kata lain harmonis.

Tabel diatas menyatakan bahwa jika dua buah negara berhadapan dalam persoalan tertentu, masing-masing mempunyai pertimbangan pilihan strategi apa yang akan dilaksanakan. Hal yang pertama dilakukan, tentu saja, sebuah negara harus mengenali dan mengukur kemampuan sendiri apakah ia lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan negara

yang dihadapi. Apakah negara mempunyai kekuatan yang memadai baik dalam hal diplomasi, ekonomi, pertahanan dan militer dalam menghadapi lawannya. Langkah kedua adalah memperkirakan strategi negara yang dihadapi. Maka dari itu, sebuah negara harus benar-benar memperkirakan dan mengukur kemampuan negara yang dihadapi tersebut.

Ada empat kemungkinan dimensi bagi kedua negara yang berhadapan dilihat dari penilaian mengenai kemampuan sendiri dan strategi negara yang dihadapi. Yang pertama, jika sebuah negara adalah sebuah negara yang kuat menghadapi negara mengancam, sedangkan negara yang mengancam itu sama kuatnya, maka akan terjadi konfrontasi. Konfrontasi disini sesuai dengan pengertian diatas antara lain akan terjadi pertentangan mengenai masalah yang sedang terjadi. Contohnya dalam tulisan ini, Taiwan diasumsikan sebagai negara yang kuat dari segi ekonomi, diplomasi maupun pembiayaan pertahanan dan militer berhadapan dengan Cina yang mengesahkan UU Anti Pemisahan. Taiwan dan Cina kemudian saling bertentangan. Pertentangan dapat terjadi dengan adanya protes resmi, perundingan-perundingan, dan atau pemutusan hubungan diplomatik. Bahkan jika Taiwan dan Cina tidak menemui titik temu dalam menyelesaikan persoalan yang ada dapat terjadi perang.

Kedua, jika sebuah negara yang kuat, menghadapi persoalan yang membuat negara lain dalam keadaan melakukan dukungan, dan keadaan negara lawan diasumsikan tidak diketahui kuat atau lemah, maka

kemungkinannya adalah terjadi keadaan Memimpin. Dengan prinsip rasionalitas, Memimpin dapat penulis jelaskan sebagai berikut: negara yang menjadi subyek pertama bisa menjadi pencetus, pemrakarsa, atau pemimpin untuk negara lain dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebagai contoh, pada awal perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur Indonesia yang masih dianggap sebagai negara yang berpengaruh di Asia Pasifik memprakarsai terbentuknya Gerakan Non-Blok. Gerakan ini antara lain untuk membentengi negara-negara yang baru saja merdeka dan baru berkembang dari pengaruh Barat maupun Timur. Seperti kita ketahui pada waktu itu kedua blok tersebut saling berebut pengaruh diantara negara-negara yang baru merdeka dan berkembang.

Ketiga, sebuah negara yang boleh dikatakan lemah dalam hal apapun itu, berhadapan dengan dua negara atau lebih. Kemudian negara-negara yang menjadi lawan dalam keadaan mendukung atau dapat dikatakan mempunyai satu visi dalam sebuah persoalan, kemungkinan yang terjadi adalah keadaan harmonis atau Konkordans. Keadaan semacam ini sangat jarang terjadi belakangan ini, namun tetap saja merupakan sebuah kemungkinan. Misalkan jika Taiwan yang ingin menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh serta diakui di dunia, berhadapan dengan Cina yang notabene tidak setuju atas kemerdekaan Taiwan. Namun Cina yang merasa tidak akan mendapatkan rugi apapun jika melepaskan Taiwan akhirnya menyetujui atau mendukung

diproklamasikannya negara Taiwan yang berdaulat. Hal tersebut kemudian menciptakan sebuah keadaan atau kondisi kedua negara dalam keharmonisan, keselarasan, atau persetujuan. Taiwan akan menjadi negara yang merdeka dan Cina tidak akan merasa terganggu dengan persoalan Taiwan. Namun keadaan konkordans ini terjadi dengan mengesampingkan berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan historis dan politis.

Terakhir, dalam keadaan sebuah negara yang tidak terlalu kuat baik dari segi pertahanan, militer, dan diplomasinya berhadapan dengan negara yang diasumsikan kuat. Selanjutnya negara lawan memicu terjadinya persoalan yang menjadikan kedua belah pihak saling bersitegang dan bertentangan. Kemungkinan yang akan terjadi ialah keadaan Akomodasi. Dalam hal ini, penulis mengartikan Akomodasi sebagai keadaan dimana negara pertama meminta penyelesaian masalah dengan cara-cara damai. Hal ini dikarenakan negara tidak cukup kuat atau lebih lemah dari segi politik maupun militer dibandingkan negara lawan.

Dalam persoalan ini, Taiwan diposisikan sebagai negara yang tidak terlalu kuat dalam segi militer dan pertahanan dibandingkan dengan RRC. Taiwan hanya menganggarkan untuk sektor militer dalam jumlah yang besar, yaitu sebesar 16.8% dari budget umum pada tahun fiskal 2003. Sedangkan Cina menganggarkan sebanyak 25 miliar Dollar AS pada tahun dirilisnya RUU Anti Pemisahan. MAC yang berbicara atas nama pemerintah Taiwan setelah pengesahan dan ratifikasi UU Anti

Pemisahan oleh Kongres RRC menyatakan bahwa kedaulatan “Republik Cina adalah milik 23 Juta jiwa rakyat Taiwan.” Selain itu MAC juga mengeluarkan beberapa butir pernyataan serius yang ditujukan untuk menggalang sikap terhadap tindakan pemerintah Cina sebagai berikut:

1. Republik Cina adalah Negara merdeka dan berdaulat dan kedaulatannya berada ditangan 23 juta rakyat Taiwan. Hanya 23 juta rakyat Taiwan yang berhak memutuskan terhadap status Negara dan masa depannya. Taiwan tidak berada dibawah yurisdiksi pemerintah RRC.
2. Perdamaian adalah solusi terbaik dalam permasalahan Lintas Selat.
3. Sifat Otoritarian rezim Komunis Cina mengakibatkan ancaman hebat terhadap stabilitas kawasan. pemerintah Cina seharusnya menyadari benar-benar bahwa kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia telah menjadi nilai umum. Mereka seharusnya segera mengimplementasikannya melalui reformasi politik dan memberikan peluang penyelesaian damai persoalan lintas selat, dan membawa perdamaian hakiki dan stabilitas ke kawasan Asia Pasifik.
4. Taiwan akan tetap mempertahankan prinsip untuk memenuhi tanggungjawab sebagai anggota komunitas internasional, termasuk menjaga mempertahankan perdamaian dan memperluas kebebasan, demokrasi dan HAM.

II. Model Aktor Rasional

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan Politik Luar Negeri. Dalam pembahasan kali ini adalah model Aktor Rasional.

Dalam model ini, Politik Luar Negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini, digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternative-alternatif itu menggunakan criteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam

kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu, para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut Politik Luar Negeri) dibuat secara rasional. Dalam hal ini, kita juga berasumsi bahwa pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga.⁹

Menurut Graham T. Allison:

“Policy choices are seen as the more or less purposive acts of unified governments based on logical means of achieving given objective. It represents an effort to relate an action to aplausable calculation”

Jadi, Alternatif pilihan kebijakan menurut Allison adalah digambarkan sebagai tindakan yang disengaja dari pemerintahan yang monolit yang didasarkan pada pemikiran yang logis dalam mencapai tujuan tertentu. Model tersebut menggambarkan usaha-usaha untuk menghubungkan tindakan-tindakan dalam pengukuran yang masuk akal.¹⁰

⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional; Analogi dan Model*, hal. 234;

¹⁰ James Dougherty, *Contending Theories of International Relations*, HarperCollins, p. 476

Dengan menggunakan Tipologi strategi dan Model Aktor Rasional, dapat dijelaskan persoalan Taiwan dan Cina sebagai berikut: Taiwan yang dapat digolongkan sebagai negara yang tidak terlalu beruntung untuk memiliki kekuatan militer sebesar Cina kemungkinan akan mengambil langkah Akomodasi. Di satu sisi, mereka nampaknya ingin menjadi negara yang benar-benar terpisah dari otoritas Komunis Cina. Di sisi lain, Cina masih menganggap bahwa Taiwan adalah bagian “yang tidak terpisahkan dari daratan Cina” dengan berbagai alasan yang diajukannya. Sampai pada sebuah titik dimana Cina menjadi salah satu negara kuat di Asia. Dari segi militer, Cina mempunyai Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army - PLA). Dengan jumlah 2,25 juta pasukan aktif, adalah kekuatan militer terbesar di dunia saat ini. Anggaran militer resmi untuk PLA pada tahun 2005 adalah sebesar 30 miliar dollar AS, belum termasuk kemungkinan pembelian senjata dari luar negeri, penelitian dan pengembangan militer, dan untuk Polisi Rakyat bersenjata, sebuah pasukan paramiliter. Anggaran militer Cina yang pada tahun 2007 mencapai 45 miliar dollar AS, atau naik sebesar 17,8 persen dari anggaran tahun 2006¹¹, menjadikan Cina yang seakan-akan tidak dapat dikalahkan oleh Taiwan. Kekuatan militer inilah yang mendorong Cina untuk mengesahkan UU Anti Pemisahan pada 2006 lalu.

¹¹ Kompas 24 Agustus 2007

Dengan adanya dukungan militer yang kuat serta pembiayaan yang menunjang, maka dapat dipastikan Cina tidak akan melepaskan Taiwan.

Sedangkan dari segi kemampuan terutama militer, Taiwan memang tidak sebanding dengan Cina. Sebagai sebuah negara, Taiwan hanya menganggarkan sejumlah 341,1 miliar Dollar Taiwan pada tahun 2007.¹²

Jumlah tersebut hanya sebesar seperempat dari anggaran Cina pada tahun yang sama. Jumlah personel militer yang dimiliki Taiwan hanya sejumlah 290.000 orang personel aktif dari total 1.965.000 orang personel tentara (termasuk wajib militer).¹³ Mengenai disahkannya UU Anti Pemisahan oleh Cina, Taiwan yang sementara ini mati-matian untuk mempertahankan diri pasti merasa tidak akan mampu menandingi militer Cina jika seandainya terjadi konflik. Pada pasal terakhir UU tersebut menyatakan “*This Law shall come into force on the day of its (RoC) promulgation*” (UU ini akan memberlakukan kekuatan militer pada hari kemerdekaan Taiwan). Hal tersebut menandakan bahwa Taiwan sudah seharusnya melakukan tindakan yang menyesuaikan dengan kemampuannya dalam menghadapi tekanan dari Cina.

Kemudian dari segi politik luar negeri, Taiwan bahkan hanya diakui oleh 24 negara (kebanyakan negara dunia ketiga) yang menjalin hubungan diplomatik terbatas dalam bidang perdagangan. Sejak keanggotaan

¹² *ibid*

¹³ wikipedia.com/military of Taiwan; access date: June 6th 2007 11:55 pm

Taiwan dicabut oleh PBB dan digantikan oleh RRC pada tahun 1971, Taiwan masih terus menerus berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara internasional terutama di PBB. Republik Rakyat Cina disahkan oleh PBB dengan resolusi nomor 2758 yang menyatakan “Recognizing that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful representatives of China to the United Nations” (mengakui bahwa perwakilan pemerintah RRC adalah perwakilan Cina yang paling sah di PBB).¹⁴

Dari segi ekonomi, kekuatan Taiwan dalam membangun ekonomi semenjak “terusir” dari daratan menjadi salah satu dari “Empat Macan Asia”. Perkembangan ekonomi Taiwan dianggap sebagai keajaiban karena kebangkitannya setelah perang saudara yang melelahkan. Pada Tahun 1962 negara ini mempunyai GNP per kapita sebesar 170 dollar AS, menjadikannya sejajar dengan Zaire dan Kongo. Sampai tahun 2002, total PDB/kapita sejumlah 406 miliar dollar AS. Dan pada tahun 2006 Taiwan sudah sejajar dengan negara Eropa seperti Yunani dengan GNP per kapita sebesar 27.600 dollar AS. Ekonomi Cina memang dapat dikatakan “terlambat bangun”, namun saat ini kedua negara dapat dianggap berdiri sejajar dari segi ekonomi.

Seperti sudah penulis nyatakan diatas bahwa Taiwan menurut perhitungan logis kedua model ini harus melaksanakan tindakan yang sesuai dengan

¹⁴ Wikipedia.com/political status of Taiwan; access date: February 11th 2007 7:55pm

kemampuannya. Artinya, Taiwan tentunya tidak ingin merugi dengan mengambil resiko bertarung melawan Cina dalam sebuah konflik militer.

Mempertimbangkan hal tersebut, kelemahan yang dimiliki Taiwan ditutupi dengan melakukan lobi kepada komunitas internasional seperti Uni Eropa (UE).

Presiden Chen Sui-Bian dalam dialog dengan anggota parlemen Eropa pada tanggal 1 Maret 2006, menyatakan bahwa UE seharusnya memperhatikan perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Timur terutama di Selat Taiwan, terlebih setelah disahkannya UU Anti Pemisahan oleh Parlemen Cina. Chen menganggap bahwa ini adalah panggilan kepada dunia internasional untuk mempertimbangkan apakah sudah terdapat usaha-usaha yang nyata dari pemerintah Cina dalam mewujudkan perdamaian di Selat Taiwan. Dan disahkannya UU ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Selain itu untuk mengawasi produksi senjata oleh Cina, UE sudah seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan tindakan terhadap RRC.

Taiwan yang selama sebelum pengesahan UU menganggap bahwa usaha mereka dilandasi dengan nait baik untuk mewujudkan stabilitas akhirnya terganggu oleh kejadian tersebut. Dan Cina nampaknya tidak akan meletakkan begitu saja rudal-rudal yang telah diarahkan ke Taiwan. Disebutkan lagi bahwa UU Anti Pemisahan ini adalah upaya sepihak dari Cina untuk mengganggu keadaan status quo yang telah berlangsung sejak

lama. Dan tentunya Taiwan tidak akan membiarkan Cina menjadi penguasa yang dapat menentukan keadaan status quo di Selat Taiwan.¹⁵

F. Hipotesa

Taiwan sebagai negara yang dipandang lemah dalam menghadapi UU Anti Pemisahan Cina tersebut, akan menyesuaikan kemampuannya dengan persoalan dan siapa yang dihadapi yaitu Akomodasi.

1. Pemerintah Taiwan akan berusaha mendapatkan dukungan dari dunia untuk setidaknya meredakan ketegangan politik dengan Cina. Mungkin saja hubungan ekonomi tidak terganggu, namun dalam hal politik dan pertahanan akan terjadi semacam perang dingin yang seru.
2. Mengeluarkan berbagai pernyataan baik melalui MAC maupun pernyataan Presiden.
3. Pernyataan sikap publik baik melalui unjuk rasa maupun jajak pendapat menuntut penyelesaian damai persoalan lintas selat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan berdasarkan teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan dibuktikan dengan data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi

¹⁵ Source: The Office of the President of the Republic of China; Published: March 1, 2005: access date 2006

pustaka dan internet. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah data sekunder yang bersumber dari literatur berbagai buku, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang digunakan.

H. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini difokuskan pada reaksi Taiwan terhadap kemajuan Cina dalam tahun-tahun terakhir dan disahkannya RUU anti pemisahan dan substansi UU anti pemisahan tersebut. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan masalah diluar batasan tersebut untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan agar lebih relevan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Menjelaskan hubungan luar negeri RRC dan Taiwan

- BAB III: Menjelaskan Undang-Undang Anti Pemisahan Republik Rakyat Cina
- BAB IV: Menjelaskan bentuk-bentuk reaksi Taiwan atas disahkannya RUU Anti Pemisahan oleh Republik Rakyat Cina
- BAB V: Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya

BAB II

HUBUNGAN REPUBLIK RAKYAT CINA DENGAN TAIWAN

RRC dan Taiwan adalah salah satu hubungan dua negara yang dapat dikatakan unik. Hal ini dikarenakan pemerintah Taiwan yang lari ke Taiwan merupakan bekas penguasa otoritas di daratan setelah berakhirnya perang sipil 1949. Sedangkan pihak yang memenangkan peperangan yaitu Partai Komunis terus menerus, bahkan sampai setelah meninggalnya Mao Zedong dan Deng Xiaoping, bersikeras menyatakan bahwa kepulauan Taiwan adalah bagian dari negara Cina. Hubungan antar kedua negara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Terdapat tujuh faktor yang berpengaruh besar dalam hubungan antara Taiwan dan Cina yaitu sejarah, kebudayaan, geografi, hukum, politik, ekonomi dan keamanan. Empat faktor yang pertama secara umum penekanannya tidak lebih besar dari faktor politik, ekonomi dan keamanan, tetapi tetap muncul sebagai bagian justifikasi yang sering dipakai dalam debat-debat kemerdekaan melawan unifikasi. Dalam berbagai kasus, faktor-faktor tersebut muncul untuk menjadi pembenaran bagi masalah kemerdekaan Taiwan atau sebaliknya sebagai dasar klaim Cina untuk unifikasi. Faktor Politik, ekonomi, dan keamanan terutama militer memberikan arah perubahan kondisi hubungan kedua negara.

A. Sejarah Hubungan Taiwan – Cina

Keraguan utama dalam isu sejarah adalah poin penting atas control Cina terhadap Taiwan. Pendukung kemerdekaan Taiwan menyatakan bahwa kekuasaan politik Cina tidak pernah cukup untuk menyatakan klaim, yang berdasarkan sejarah, bahwa Taiwan seharusnya adalah bagian dari Cina. Di lain pihak, pendukung unifikasi berpendapat bahwa Taiwan adalah bagian Cina dari sejak zaman dahulu kala. Cerita sejarah yang beredar berbeda-beda tergantung dari ilmuwan sejarah yang menceritakannya.

1. Sebelum 1895

Sejarah awal dalam situs kemerdekaan Taiwan menyatakan bahwa “catatan sejarah Taiwan yang paling lengkap kembali pada bahwa sekitar 350 tahun lalu, pada masa penjajahan Belanda antara tahun 1642 – 1662. Ketika Perusahaan Est-Indies datang, mereka menemukan hanya penduduk asli yang ada dipulau tersebut dan tidak ada tanda-tanda keberadaan struktur pemerintahan dari kerajaan Cina. Maka *pada saat itu Taiwan ‘bukan bagian dari Cina’*”.

Salah satu ilmuwan yang meneliti peninggalan arkeologi di Taiwan, Dr. Hsieh Chiaomin, menyimpulkan bahwa “kebudayaan penduduk asli di sebelah utara dan bagian tengah Taiwan terhubung dengan bangsa Cina

daratan, sementara yang di selatan dan Timur terhubung dengan kebudayaan kepulauan laut selatan”.¹⁶

Sejarah resmi Cina menyatakan bahwa ekspedisi besar-besaran yang mencakup 10 ribu orang laki-laki dikirim ke Taiwan oleh kerajaan Wu zaman Dinasti Tiga Kerajaan abad ke-3 M dan oleh dinasti Sui pada abad ke-7 M. Laporan Cina juga menjelaskan pembangunan pos pemerintahan di pulau PengHu untuk memerintah Taiwan pada periode dinasti Song abad ke-12 M. Karena mengalami kesulitan dalam bepergian dan komunikasi pada era awal, maka tidak mengejutkan jika bangsa Belanda tidak menemukan adanya organisasi pemerintahan di Taiwan ketika mereka datang pada abad ke-16 M.

Laporan bangsa Taiwan menyatakan bahwa “orang Taiwan” pertama sebenarnya adalah bangsa Cina yang dipindah ke Taiwan oleh orang Belanda sebagai buruh kerja paksa kemudian menikah dengan penduduk asli dan menetap disana. Laporan pemerintah Cina tidak menyebutkan adanya para imigran ini. Walau demikian, secara umum kedua pihak setuju bahwa pendudukan bangsa Cina di Taiwan belum dimulai sampai bajak laut menyerang provinsi Fujian, Zheng Chenggong (di Barat dikenal dengan Koxinga), seorang loyalis dinasti Ming dikejar sampai keluar dari daratan oleh pasukan dinasti Qing dan lari bersama tentaranya menuju Taiwan. Ketika sampai di Taiwan, ia mengalahkan penjajah Belanda dan

¹⁶ www.Wikipedia.com/PRC-RoC relations; date taken 25 Mei 2005

menandatangani perjanjian dengan bangsa Belanda pada 1 Februari 1662 dan memaksa mereka untuk mundur. Pemerintahan baru Zheng adalah pemerintahan di pengasingan yang berharap suatu hari dapat kembali ke daratan Cina dan mengusir bangsa Manchuria. “Pemerintahan” pengasingan Zheng mempunyai karakteristik yang sama dengan pemerintahan Chiang Kai-Sek pada tahun 1949. Catatan Cina tentang Zheng tidak dapat menjelaskan bahwa ia adalah loyalis dinasti Ming yang meloloskan diri dari pemerintahan dinasti Qing dan mendapat keuntungan pada masa pendudukannya di Taiwan. Zheng dan anak dan cucunya setelah dia meninggal, mempertahankan pemerintahan sampai 1683 ketika akhirnya dikalahkan oleh pasukan dinasti Qing.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai seberapa besar kekuasaan dinasti Qing di Taiwan selama 212 tahun antara 1683 – 1895. Catatan pemerintah Cina menjelaskan usaha-usaha resmi untuk memetakan area tersebut dan menjadikan wilayah tersebut sebagai kabupaten provinsi Fujian, yang disebut Taiwan (Teluk beranda), pada tahun 1727. Menurut laporan pemerintah Cina, tahun 1887 Taiwan dijadikan provinsi penuh dari kerajaan Cina dengan 11 distrik dan 5 cantons (subdistrik). Jenderal Liu Manchuan adalah gubernur pertama. Dia mulai membangun jalur kereta api, membuka tambang, meluncurkan telegram dan layanan pos surat, membangun kapal perdagangan, memulai industri dan membangun sekolah gaya baru. Usaha-usaha ini memicu sebuah periode pertumbuhan

ekonomi yang kuat. Pendukung kemerdekaan Taiwan berpendapat bahwa pada waktu itu tidak ada pemerintahan yang riil dan penduduk Taiwan tetap dalam pemberontakan. Mereka mengutip pendapat yang mengatakan bahwa “Kerusuhan setiap tiga tahun dan pemberontakan setiap 5 tahun”. Cerita penduduk Taiwan juga menjelaskan sejumlah konflik dengan pemerintah Qing, hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung mengatakan bahwa memang terdapat adanya control politik (pemerintahan), walaupun akhirnya hilang.

Sebagian besar masa 212 tahun dapat digolongkan sebagai salah satu masa lemahnya sistem hukum dan perlawanan berdarah di Taiwan. Pendudukan asing (Belanda, Spanyol, Portugis, Jepang dan akhirnya Perancis) tidak hanya berperang terhadap sesamanya, mereka juga bertempur melawan penduduk asli (aborigin, bangsa Fujian, bangsa Kanton, dan Hakka) yang akhirnya mereka juga berkelahi diantara mereka sendiri. Pertama Zheng, kemudian orang asing, mendatangkan buruh dari Cina. Banyak orang yang menikah dengan penduduk asli menetap disana. Pemerintahan Dinasti Qing setelah mengalahkan Zheng tidak dapat melaksanakan kontrol total terhadap pulau tersebut.

Ketika terjadi berbagai serangan gerombolan bajak laut dan para penjahat lainnya terhadap kekuatan asing di sepanjang pantai Taiwan, pemerintah penjajah mengajukan keberatan kepada Kaisar Qing. Kaisar mengatakan bahwa “Taiwan bukanlah bagian wilayah kami”, seperti diceritakan oleh

para pendukung kemerdekaan. Apapun sebenarnya yang dikatakan oleh Kaisar, banyak ilmuwan sejarah sependapat bahwa kekaisaran Qing, di paruh kedua abad ke-19, hanya dapat melaksanakan sedikit kekuasaan terhadap Taiwan, khususnya untuk melindungi orang asing. Bahkan sebenarnya, karena sebagian besar masa ini bersamaan dengan masa Perang Opium dan pemberontakan Taiping yang parah di Cina. ketika orang-orang asing menggambarkan Cina sedang mengalami masa yang dikenal dengan *Masa penghinaan*, tidak mungkin Kaisar menawarkan bantuan dan melindungi orang asing walaupun dia bisa. Tetapi, selama periode ketika banyak sekali “kebijakan-kebijakan yang tidak adil” dibuat di pemerintahan Qing, Kaisar sangat lemah dan lebih mengurus penyelamatan tahtanya daripada mengurus gangguan di pulau Taiwan. Banyak wilayah di Cina, selain Taiwan yang tidak berada dalam kontrol ketat pemerintahan Qing.

Tahun 1893 populasi di Taiwan mencapai 2,54 juta jiwa dengan 507.000 kepala keluarga, dan kemajuan ekonomi sedang dalam proses. Pertanian dan perdagangan menjadi penyokong utama populasi dan kemandirian sedang akan terwujud. Faktanya, sekarang ini Taiwan dianggap sebagai salah satu provinsi Cina yang paling modern.

2. 1895 – 1949

50 tahun berikutnya dalam sejarah Taiwan adalah periode penjajahan oleh bangsa Jepang. Tahun 1895 tentara Jepang mengalahkan militer

kekaisaran Qing dan bangsa Cina dituntut untuk berdamai. Setelah era permasalahan politik antara Jepang dengan Cina, Jerman, Perancis dan Rusia, Jepang membuat Cina meneken Perjanjian Shimanoseki. Perjanjian tersebut antara lain menjadikan Korea protektorat Jepang (dibawah perlindungan / pendudukan Jepang), dan sebagai tambahan, 4 pelabuhan yang dijanjikan, termasuk Chongqing, sebuah pelabuhan didalam wilayah Cina. Perjanjian tersebut juga berisi penyerahan Liaodong (Selatan Manchuria), pulau Pescadores (PengHu), dan Taiwan kepada Jepang dalam waktu yang tidak terbatas.

Fokus pertama Jepang di Taiwan adalah konsolidasi politik. Mereka menghadapi pemberontakan oleh penduduk lokal yang membentuk “Republik Taiwan Merdeka”. Penduduk asli juga melawan pendudukan Jepang dengan sejumlah perlawanan. Faktanya, selama masa pendudukan Jepang, terdapat berbagai macam elemen masyarakat yang terus menerus bekerja untuk kemerdekaan Taiwan.

Orang Jepang, pada masa itu, mengambil dua langkah utama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Mereka memperkenalkan system kepolisian yang disiplin dan terorganisasi dengan baik dan mereka menggunakan system pendidikan untuk menggabungkan budaya Taiwan dengan budaya Jepang. Tahun 1935 semua sekolah memakai pengantar bahasa Jepang dan orang Taiwan menjadi lebih sama dengan orang Jepang ketimbang dengan orang Cina. Orang-orang muda lebih melihat kedepan

dengan mengikuti proses modernisasi Jepang yang sukses ketimbang melihat kepada warisan budaya bangsa Cina. Mereka menghargai efisiensi pemerintahan Jepang karena pemerintahan Cina pada masa lalu tidaklah efisien.

Pada masa itu orang Jepang banyak berinvestasi dibidang infrastruktur untuk memfasilitasi aktifitas ekonomi. Mereka membangun pelabuhan-pelabuhan, pembangkit tenaga air, sistem irigasi, jalan tol dan rel kereta api dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menyediakan produk pertanian untuk Jepang dan untuk menjadikan Taiwan pasar produk Jepang. Mereka juga mendorong perpindahan dari Jepang ke Taiwan karena Jepang sudah terlalu padat, tapi program ini tidak sukses yang diharapkan. Bagaimanapun, sampai tahun 1945, terdapat lebih dari 400.000 orang Jepang di Taiwan yang kebanyakan bekerja di area sipil ataupun militer, pendidikan, pegawai teknik dan industri. Hanya sedikit orang Jepang yang bertani disana karena masih dikuasai oleh orang Taiwan. Populasi Taiwan saat ini adalah 6 juta jiwa lebih.

Pendidikan lanjutan tingkat 2 untuk orang Taiwan adalah pendidikan dasar di Jepang. Selama 1915 sampai 1935 mahasiswa Taiwan yang belajar di Jepang mulai mendengar konsep Woodrow Wilson tentang penentuan nasib sendiri dan mereka sangat antusias untuk memasukkan gagasan baru ini kedalam sebuah bentuk “Home Rule Movement” untuk Taiwan. Mahasiswa muda Taiwan yang brilian yang ada di Jepang

mengatur barisan dan mulai untuk menekan Jepang untuk menambah otonomi. Mereka membentuk Asosiasi Home Rule dan menerbitkan jurnal seperti *Formosan Magazine*. Bagaimanapun orang Jepang dapat menekan gerakan tersebut.

Pada waktu invasi Jepang terhadap Cina pertengahan tahun 30-an banyak warga Taiwan diakulturasikan. Mereka berbicara dengan bahasa Jepang seperti yang diajarkan dan bahkan memakai nama Jepang dan kebiasaan-kebiasaan Jepang. Banyak dari mereka yang menjadi tentara di ketenteraan Jepang dan hal tersebut menjadi masalah yang serius bagi Tentara Nasionalis Cina (KuoMintang) yang menerima penyerahan diri Jepang pada tahun 1945. Selama masa itu, terdapat nuansa perlawanan terhadap Jepang dan kecenderungan kuat atas pembentukan Negara bangsa Taiwan yang merdeka berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Masa penjajahan Jepang berakhir ketika mereka kalah pada tahun 1945. Sebelum menyerah, negara-negara adikuasa (AS, Inggris, Perancis dan Uni Soviet) telah sepakat di Kairo, Postdam dan Yalta untuk mengembalikan Taiwan kepada Cina dan pada saat itu pemerintah Cina yang berkuasa adalah Chiang Kai-Sek dan KuoMintang; sekutu perang.

Masa penjajahan Jepang menyebabkan rakyat Taiwan, kebanyakan keturunan orang-orang yang memasuki Taiwan dari Fujian dan Guangdong pada abad 17 dan 18, memikirkan masa depan mereka.

Mereka bersatu menganggap Jepang sebagai dasar otoritas politik, tapi sepanjang masa itu banyak anak muda Taiwan yang menginginkan / mencari berbagai cara untuk untuk membuat pulau itu menjadi Negara yang merdeka. Mereka yakin bangsa Cina telah mengabaikan mereka begitu saja di tahun 1895. Selama itu beberapa kebiasaan adat Cina dihilangkan karena bangsa Jepang mendidik mereka dengan nilai-nilai budaya Jepang.

3. 1945 – sekarang

Perang saudara antara komunis dan nasional mengakibatkan pengaruh yang mendalam dalam pemikiran masa kini mengenai permasalahan lintas Selat secara terbuka dan terus menerus. Kemungkinan konsekuensi terpenting dari perang saudara tersebut adalah menghilangkan sikap-sikap ketidakpercayaan dan kebencian diantara pemimpin militer dari dua belah pihak. Sikap saling tidak percaya ini bertahan dari dan ke generasi pemimpin militer dan kemudian dipelajari dalam studi sejarah kemiliteran dan doktrin militer. Sejarah tersebut diangkat menjadi nyata oleh mereka yang terlibat dengan menceritakan cerita pengalaman bertempur dengan pihak lawan.

Gerakan komunis dimulai pada Juli 1921 ketika 13 delegasi mewakili 60 anggota partai komunis bertemu secara rahasia di sebuah sekolah wanita pada saat menyerahnya Perancis di Shanghai. Beberapa delegasi adalah mahasiswa Marxis yang baru saja pulang dari Eropa dan beberapa

diantaranya seperti Mao Zedong belajar komunis sendiri sembari bekerja di Cina. Kesamaan tujuannya adalah untuk membersihkan Cina dari peperangan, imperialism easing, dan tuan tanah. Hampir semua anak muda Cina Idealis setuju bahwa bangsa Cina harus menyelesaikan permasalahan dan masalah reunifikasi, tetapi mereka tidak sepakat dengan cara apa menyelesaikannya.

Untuk pertama kalinya komunis dan nasionalis bekerjasama dalam harapan dan keputusan yang sama. Pemimpin yang mereka anggap sebagai bapak Cina modern, Dr. Sun Yat Sen, mencapai kesepakatan awal (Januari 1923) dengan diplomat Soviet, Adolf Joffe, untuk bantuan Soviet dalam usahanya mengkonsolidasikan Cina. Selanjutnya dalam tahun yang sama orang komunis berjumlah 300 orang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan KuoMintang (KMT) untuk menyelesaikan tugas utama mereka untuk me-reunifikasi China. Argumen para anti imperialis Soviet juga sangat menarik perhatian para pemimpin Nasionalis.

Periode ini dikenal sebagai "*the First United Front*". Uni Soviet mengirimkan Borodin (Mikhail Gruzenberg), seorang agen komunis ke Cina untuk memberi saran kepada komunis dan nasionalis. Dia meyakinkan pihak komunis untuk bergabung dengan KMT sementara tetap mempertahankan keanggotaan partai komunisnya. Dia memperkenalkan teknik-teknik organisasi Leninis kepada KMT, termasuk prinsip demokrasi terpimpin.

Setelah perang saudara selesai dan dimenangkan oleh Partai Komunis, tentara Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke pulau Taiwan. Kemudian mereka mengklaim diri mereka masih menjadi pemerintah Republik seluruh Cina yang sah. Sampai pada akhirnya Taiwan tidak lagi menjadi anggota PBB karena keanggotaannya diambil oleh RRC pada tahun 1971. Sejak saat itu Taiwan sendiri hanya diakui kebanyakan oleh negara-negara kecil dan kebanyakan hanya bersifat hubungan ekonomi dan perdagangan.

Karena Cina begitu terpecah-pecah karena adanya "*warlordisme*", hampir semua para pemimpin sepakat bahwa reunifikasi diselesaikan dengan cara militer. Fokus upaya tersebut adalah Akademi Militer Whampoa yang didirikan tahun 1924 oleh KMT, didukung oleh Uni Sovyet, dikepalai oleh Chiang Kai-shek. Chiang baru saja kembali dari Moskow dalam rangka belajar organisasi militer. Aspek organisasi militer yang paling signifikan diperkenalkan kepada Cina oleh Chiang Kai-Shek dan para penasehat dari uni Sovyet di sekolah dimana ada sistem komissar politik, yaitu sebuah alat dan doktrin organisasi untuk memastikan keandalan kekuatan militer. Dr. Sun dan Chiang Kai-Shek diyakinkan oleh Borodin untuk menunjuk Zhou Enlai (Chou En Lai), seorang pelajar yang baru saja kembali dari Perancis yang kemudian menjadi orang penting di RRC menjabat Direktur Departemen Politik. Dari posisi tersebut, Chou dapat mempengaruhi pemikiran para pelajar dan penunjukan Komunis kepada posisi kunci

melalui pasukan KMT. Salah satu murid yang pertama adalah Lin Biao, yang kemudian menjadi perwira senior di dinas militer pada Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army – PLA). Komunis berhasil menempatkan pengikutnya kedalam penugasan operasional didalam unit ketentaraan KMT yang kemudian bertarung melawan Komunis. Orang-orang itu dibekali dengan informasi intelijen kepada pasukan komunis selama perang saudara. Orang-orang nasionalis percaya bahwa tindakan subversi dan infiltrasi kedalam pasukan mereka ini melalui sistem komisar politik adalah salah satu faktor yang paling penting dalam kekalahan mereka dari komunis.

Pada 1 Juli 1926, gabungan pasukan Nasionalis-Komunis, dipimpin oleh Chiang Kai-Shek dan muridnya di Whampoa, melaksanakan ekspedisi Utara yang ditujukan untuk memulai konsolidasi militer dan politik dan unifikasi Cina. Sun Yat Sen meninggal tahun 1925 dan Chiang Kai-Shek meneruskan kepemimpinan KMT. Ketika kampanye dimulai terjadi perpecahan antara perwira komunis dan nasionalis dalam kepangkatan ketentaraan, berdasarkan pendekatan ideologi. Selama kampanye, muncul berbagai perbedaan dalam strategi. Komunis yang memusatkan pada perkotaan (Nanchang dan Kanton), dan pedesaan (Changsa) muncul sementara Chiang lebih suka menggunakan kekuatan militer. Chiang bertemu dengan Borodin dan perwira lainnya pada 11 Januari 1927 untuk menjelaskan kedudukannya. Gagasannya ditolak dan kemudian ia dihina

didepan publik oleh Borodin dan perwira kiri lainnya. Konflik antara kedua kubu telah menjadi konflik pribadi.

Perbedaan ideologi mengemuka pada musim semi 1927 di Shanghai. Borodin dan elemen kiri KMT sibuk mengatur buruh dan petani untuk bangkit melawan para tuan tanah dan industrialis. Pada 21 Maret 1927 dipimpin oleh *General Labour Union* (Serikat Buruh), mereka mengadakan gerakan massa di Shanghai sehingga membuat kota tersebut lumpuh. Chiang, walaupun pada dasarnya mendukung gerakan buruh, di sisi lain sangat dekat dengan kelompok pelaku bisnis karena mereka sumber dana utama. Dia akhirnya menyatakan bahwa serikat buruh ilegal dan mengancam mereka untuk memulihkan keadaan. Pada April dia menyingkirkan komunis KMT yang dia ketahui dan kemudian mematikan front persatuan pertama. Pada waktu itu komunis menyimpulkan bahwa Chiang Kai-shek telah menunjukkan wajahnya yang sebenarnya sebagai perwakilan atau perwujudan “kaum *Bourgeoise* Nasional” sementara mewakili buruh dan petani.

Selama sepuluh tahun berikutnya kaum komunis dan nasionalis masih dalam keadaan perang yang sangat menghancurkan. Pada Oktober 1934 kaum nasionalis mencapai kemenangan dan mengepung komunis di basis provinsi Jiangxi dengan menggunakan taktik militer yang unik menghancurkan titik terberat. Komunis pada waktu itu dapat mendobrak dan melarikan diri sejauh 6000 mil ke Selatan, lalu ke Barat, dan akhirnya

Utara ke Yan'an di Provinsi Shanxi dimana mereka mendirikan markas komando. Pelarian ini yang kemudian dikenal dengan nama *Long March*. Mao Zedong memimpin kelompok tentara komunis melewati dataran yang kejam sambil bertempur sepanjang perjalanan. Dia kehilangan hampir 90 persen tentaranya dalam pertempuran, wabah penyakit dan lemah. Sejumlah 8000 atau 9000 yang menyelesaikan perjalanan menjadi pahlawan untuk cita-cita komunis. Long March terjadi pada waktu KMT memproklamkan peraturan militer yang mana substansinya menjadi pondasi banyak peraturan militer di Taiwan.

Setelah perang berakhir dengan kemenangan untuk Partai Komunis pimpinan Mao Zedong, pemerintah usiran Republik Cina pindah ke kepulauan Taiwan. Dari sejak tahun 1949 Republik Cina Nasionalis masih menjadi wakil Cina di PBB. Dari situ pula tidak berakhir pertikaian antar sesama Cina. Taiwan dicabut keanggotaannya oleh PBB dan digantikan oleh RRC pada tahun 1971. Dengan kata lain PBB mengakui negara Cina yang sah adalah RRC. RRC disahkan oleh PBB dengan resolusi nomor 2758 yang menyatakan "*Recognizing that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful representatives of China to the United Nations*" (mengakui bahwa perwakilan pemerintah RRC adalah perwakilan Cina yang paling sah di

PBB).¹⁷ Taiwan masih sampai sekarang berusaha mendapatkan pengakuan secara internasional terutama kursi anggota tetap PBB.

Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Taiwan menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara *de facto* diakui hanya oleh 29 negara kecil di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan umumnya adalah negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki *potensi* strategis didunia internasional. Salah satu upaya pemerintah Taiwan adalah *melirik ke selatan* (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali. Ia mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama dibidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRC karena Indonesia dianggap “main mata dengan provinsi yang membangkang itu“.

Taiwan menjalani hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRC pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer.

Pada masa pemerintahan George W. Bush, Taiwan kembali dianggap

¹⁷ Wikipedia.com/political status of Taiwan; access date: February 11th 2007

penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh Cina khususnya dalam bidang perdagangan.

Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi. Hal ini terjadi mengingat Taiwan secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia yang signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk menanam investasi di kawasan ini selain di Hong Kong dan Singapura. Dalam hal hubungan diplomatik dengan Cina, sampai sekarang Taiwan tidak mempunyai status hubungan yang jelas walaupun dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Kantor-kantor seperti Kantor Perwakilan Ekonomi dan Kebudayaan Taipei dan American Institute di Taiwan beroperasi sebagai kedutaan *de facto* dengan status diplomatik yang, seperti sudah dijelaskan diatas, tidak jelas.

Hubungan Cina dan Taiwan masa kini tak ubahnya seperti perang dingin. Dari segi politik, tidak pernah ada penyelesaian yang jelas mengenai status Taiwan. Sejak perseteruan ideologi Nasionalis dan Komunis, pencabutan keanggotaan Republik Cina dari PBB, pengakuan kedaulatan RRC oleh AS, bahkan sampai dirilisnya UU Anti Pemisahan ini. Berbagai pro dan kontra mengenai hal ini telah banyak mengemuka. Namun dari segi ekonomi, investasi Taiwan justru mengalir di daratan Cina.

Debat mengenai pembukaan *Three Links* atau Tiga Jalur dengan daratan Cina juga sedang berlangsung, dengan hambatan yang paling berat yaitu jaminan resiko ketergantungan ekonomi kepada Cina daratan. Dengan mengurangi biaya transportasi, diharapkan akan menambah pemasukan ke Taiwan dan bisnis terus berjalan yang berpusat di Taiwan sementara memindahkan industri manufaktur dan berbagai fasilitas produksi ke daratan Cina. Secara hukum investasi Taiwan, perusahaan apapun yang berinvestasi di RRC tidak boleh menanam lebih dari 40% dari total asset yang mereka miliki. Hal ini menjadi sesuatu yang mengundang debat politis. Taiwan berharap menjadi pusat operasi terbesar di Asia Timur. Lebih jauh, banyak bisnis dan wilayah di Taiwan berharap dapat menghasilkan pemasukan dari turis Cina daratan jika dan ketika Tiga Jalur sudah dibicarakan.

B. Bentuk-bentuk Hubungan RRC dan Taiwan

Dalam melaksanakan hubungan antar kedua negara, Taiwan lebih memilih untuk melakukannya melalui kantor-kantor diluar kementrian Luar negerinya. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah *Mainland Affair Council* (MAC) atau Dewan Urusan Daratan Taiwan. Walaupun kedua negara tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi, hubungan ekonomi tetap berjalan. Investasi Taiwan di Cina terus berkembang. Di Taiwan sendiri ada aturan yang dinyatakan dalam UU investasi bahwa berbagai bentuk investasi Taiwan di daratan Cina tidak boleh melebihi 40%

dari total aset perusahaan induk. Taiwan ingin menjadi negara manufaktur terbesar di Asia Timur. Dan karenanya, investasi di daratan Cina dianggap hal yang sangat menguntungkan.

Dalam persoalan lintas selat terutama mengenai isu kemerdekaan melawan unifikasi, Taiwan dan RRC mengadakan berbagai pembicaraan mengenai kemungkinan resolusi damai di kawasan Selat Taiwan. Hubungan antar kedua negara ini tidak pernah harmonis bahkan sejak perang saudara Cina tahun 1947 sampai 1949 yang berakhir dengan kemenangan untuk Komunis Cina. Hubungan politik yang sudah penuh diperparah dengan dikeluarkannya resolusi PBB yang mencabut keanggotaan Taiwan (pada waktu itu Republik Cina) dari PBB, dan menggantinya dengan RRC sekaligus mengakui bahwa RRC adalah otoritas yang diakui di daratan maupun kepulauan Cina. Arah menuju normalisasi hubungan semakin kabur dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh AS terhadap Taiwan, disertai kunjungan resmi Presiden Nixon ke RRC pada awal 80-an. Sampai presiden Taiwan pada waktu itu, Chiang Ching-Kuo mengeluarkan kebijakan *Three-Noes*.

Berbagai pembicaraan mengenai perdamaian, normalisasi dan rekonsiliasi antar kedua negara kembali diuji dengan disahkannya UU Anti Pemisahan oleh Cina. Dari situ seolah terlihat bahwa berbagai pembicaraan terhenti. Situasi di Selat Taiwan digantikan dengan ketegangan. MAC sebagai jembatan hubungan antara Taiwan dan RRC hanya dapat memberi pernyataan yang mengajak RRC untuk kembali duduk di meja perundingan membicarakan normalisasi hubungan.

Dari berbagai aspek hubungan antar kedua negara, hanya hubungan ekonomi dan perdagangan yang berjalan lancar sampai sekarang, bahkan ketika disahkannya UU Anti Pemisahan menjadi polemik. Di luar hubungan itu, diantara keduanya mempunyai klaim sendiri mengenai interpretasi politis akan “keadaan status quo”, perdamaian, dan kebebasan penentuan nasib sendiri.

BAB III

UNDANG-UNDANG ANTI PEMISAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA

Undang-Undang Anti Pemisahan (secara bahasa: UU Anti Pemisahan Negara) adalah hukum atau undang-undang milik pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC). Walaupun UU tersebut terbilang pendek karena hanya memuat 10 pasal, UU itu memuat berbagai kontroversi karena seolah-olah mengesahkan kebijakan lama RRC untuk menggunakan “cara-cara non-damai” melawan gerakan kemerdekaan Taiwan. Dirilisnya UU ini antara lain disebabkan adanya klaim sejarah RRC yang menganggap Taiwan adalah “bagian tidak terpisahkan” dari Cina. UU tersebut tidak memberikan detail apa yang akan membuat pemerintah Cina melakukan serangan. UU tersebut menambah ketegangan politik di kawasan Selat Taiwan di satu sisi. Di sisi lain, UU itu memberikan ukuran kejadian yang mengizinkan dilangsungkannya tindakan militer. Adanya alasan lain yang melatar belakangi disahkannya UU akan dibahas penulis sebagai berikut.

Permulaan abad ke-21 Cina mengejutkan dunia internasional karena perkembangan ekonominya yang bombastis. Sementara angka kemiskinan masih tinggi (menelan biaya hingga sebesar US\$ 1,4 Milliar dari subsidi pada tahun 2004), sebanyak US\$ 25 Milliar dialokasikan untuk pengeluaran sektor pertahanan untuk tahun 2004 saja, naik tajam sekitar 46% sejak 2001. Selain untuk pertahanan,

sebanyak US\$ 1,6 Milliar dialokasikan untuk Olimpiade Beijing 2008. Kemudian sekitar US\$ 3,15 Milliar alokasi dana dikeluarkan untuk membangun gedung kaca raksasa didekat lapangan Tian An Men. Cina merasa sebagai negara yang besar membutuhkan gedung teater modern agar sebanding dengan statusnya sebagai negara besar¹⁸.

Kongres Rakyat Cina juga menyetujui peningkatan anggaran pertahanan 13% menjadi US\$29,5 miliar per tahun. Pengumuman dari pemerintah Cina minggu lalu tentang UU anti pemisahan itu mengundang reaksi dari Taiwan dan AS. Namun dalam persidangan utama dari kongres tahunan parlemen Cina, UU itu disetujui hampir aklamasi, dengan 2.896 suara setuju, nol suara menentang, dan dua abstein. UU itu sendiri berisi klausul yang memperbolehkan pemerintah Cina untuk menggunakan cara "non-damai dan cara apapun yang diperlukan" bila upaya unifikasi melalui jalan damai gagal terlaksana. Beberapa pengamat melihat, penekanan Cina atas "upaya-upaya non-damai" tampak sengaja dirancang untuk memasukan alternatif penggunaan kekuatan militer, termasuk blokade atau sanksi ekonomi.

Kemajuan ekonomi Cina yang sangat luar biasa ini, disusul kenaikan anggaran pertahanan, berlanjut sampai akhirnya pada bulan Desember 2004, kantor berita nasional Cina Xinhua melaporkan Kongres Rakyat Nasional akan membahas dan

¹⁸ Yan, Li Yong, *China, One System, two Chinas*, Asia Times Online Ltd; 2004. from www.wikipedia.com ; access date: March 21st 2007

mengesahkan UU Anti Pemisahan dalam sesi sidang berikutnya, namun laporan tersebut tidak menyebutkan Kongres akan membahas rincian UU yang dimaksud.¹⁹

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Undang-undang Anti Pemisahan

Pada masa Pemerintahan dinasti Ching, Zheng Cheng Ho berikut anak cucunya memerintah di Taiwan selama 22 tahun sebelum Dinasti Ching menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Manchuria (Dinasti Qing) pada tahun 1683, menyusul kekalahan perang. Kemudian kepulauan Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing selama 212 tahun sampai tahun 1895.

Ketertarikan negara lain terhadap pulau Taiwan membuat pemerintahan Qing sadar akan pentingnya Taiwan sebagai gerbang menuju tujuh provinsi di sepanjang pantai sebelah tenggara Cina. Pada tahun 1885, dinasti Qing menjadikan Taiwan sebagai provinsi ke-22. Selama lebih dari 200 tahun pemerintahan dinasti Qing, Taiwan menjadi bagian penuh kekaisaran Cina.

Meskipun Taiwan pernah diserahkan kepada Jepang dalam pelaksanaan perjanjian Shimanoseki tahun 1895, dan kemudian diserahkan oleh Jepang tahun 1945 kepada pemerintahan Republik Cina yang menggusur kekaisaran, pemerintah RRC tetap menganggap Taiwan sebagai provinsi ke-23. Menurut pendapat RRC, pemerintah Republik Cina sudah tidak lagi sah sejak kekalahannya dalam perang sipil

¹⁹ www.wikipedia.com/Anti-Secession Law of the People's Republic of China; access date: November 2005

dan mundurnya ke kepulauan Taiwan pada tahun 1949. Dan oleh karena itu segala bentuk kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan di Republik Cina secara langsung diserahkan kepada pemerintah RRC. Termasuk didalamnya, Taiwan ketika itu masih milik pemerintahan Republik Cina. Sikap resmi pihak Republik Cina menjelaskan bahwa Republik Cina tidak pernah tidak sah pada 1949, dan sampai sekarang masih melanjutkan fungsi sebagai entitas politik yang berdaulat di Taiwan, mengadakan hubungan antara RRC dan Republik Cina (Taiwan) sama seperti antara negara terpecah lainnya (seperti Korea Utara dan Korea Selatan). Posisi RRC telah diketahui banyak pihak namun tidak menjadi pengakuan resmi, karena kebanyakan negara memilih untuk bersikap pragmatis mengenai masalah ini. Sementara itu, beberapa pendukung kemerdekaan Taiwan juga mempertanyakan keabsahan kedaulatan RRC terhadap Taiwan.

Dalam isu politik, berbagai macam jajak pendapat yang dilakukan di Taiwan mengindikasikan bahwa terdapat hanya sedikit dukungan terhadap reunifikasi dengan syarat-syarat yang diajukan RRC maupun dukungan untuk proklamasi kemerdekaan. Berbagai jajak pendapat tersebut juga kembali menunjukkan bahwa mayoritas orang Taiwan akan mendukung penyatuan kembali jika sistem politik dan ekonomi kedua belah pihak dapat disatukan. Tetapi mereka juga akan mendukung kemerdekaan jika tidak terdapat ancaman invasi atau konsekuensi ekonomi lainnya, seperti embargo dan pencabutan hubungan kerjasama ekonomi. Nampaknya mayoritas rakyat Taiwan menyatakan mendukung *status quo*, seperti nampak dalam jajak pendapat yang

dilakukan Mainland Affair Council (MAC) mengenai hubungan lintas selat. Pada tahun November 2005 hanya sekitar 10,3% penduduk yang mendukung kemerdekaan secepatnya, dan hanya 4,2% pada Desember 2002 yang mendukung terjadinya unifikasi. Sebaliknya, dalam hal ini, angka yang menyatakan mendukung status quo namun abstain mencapai 41,5% pada April 2006²⁰. Namun, ada pendapat lain mengenai status quo yang mengatur bagaimana posisi atau status rakyat Taiwan dengan RRC dan dengan masyarakat internasional.

Sampai pada terpilihnya kembali Chen Sui Bian sebagai presiden Taiwan pada Pemilu 2004, mengarah kepada sebuah kesimpulan bahwa akan terdapat kemajuan dalam sentimen atau gagasan kemerdekaan Taiwan, dan bahwa identitas Taiwan yang baru telah muncul bertolak belakang dengan persamaan identitas dengan Cina. Pada pemilihan legislatif Taiwan tahun 2004, strategi yang dilakukan koalisi “Pan-Green” adalah memanfaatkan isu ini untuk memenangkan suara mayoritas dalam lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) *Yuan*. Keyakinan diantara para rakyat Taiwan, kemenangan mayoritas Pan-Green dapat memaksakan referendum darurat untuk reformasi konstitusi, dan, mungkin, lebih jauh kepada proklamasi kemerdekaan sehingga Taiwan sah menurut hukum (*de jure*). Banyak pendukung kemerdekaan Taiwan, termasuk mantan presiden Lee Teng-Hui, berpendapat bahwa Taiwan seharusnya sudah harus memproklamirkan kemerdekaannya sebelum 2008 dengan

²⁰ [www.mac.gov.tw/strait-relation polling](http://www.mac.gov.tw/strait-relation_polling)

dasar teori bahwa tekanan internasional akan dapat mencegah RRC untuk menggunakan kekuatan menyerang Taiwan.

Kejadian di akhir 2004 ini benar-benar mengejutkan Beijing. Pengamat mengatakan bahwa banyak pihak di Beijing percaya bahwa kebijakannya mengenai Taiwan telah gagal seluruhnya karena tidak disertai dengan dukungan yang cukup untuk merebut dukungan rakyat Taiwan. Pada saat yang sama, sepertinya banyak pihak di Taiwan tidak memperdulikan ancaman Beijing untuk menggunakan kekuatan secara serius. Pemerintah Republik Cina Taiwan mengartikan status quo adalah sebuah cara proklamasi kemerdekaan secara *de jure* sementara tidak melakukan perubahan mengenai status quo itu sendiri. Beberapa masyarakat Cina meyakini kejadian ini akan mengarah kepada UU Anti Pemisahan yang dirancang tahun 2003 dan 2004.

Pada tahun 2004, RUU yang sama sudah pernah muncul. Berjudul UU Gerakan Unifikasi Republik Rakyat Cina, ditulis oleh seorang profesor non-pegawai negeri Cina, Yu Yuanzhou, dari Universitas Jiangnan Provinsi Wuhan sebagai usulan untuk menciptakan dasar legal formal unifikasi Cina. Tidak ada tindakan resmi dari badan legislatif mengenai dokumen tersebut. Sementara itu muncul perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, dan dokumen yang menyerupai UU Anti Pemisahan harus segera disahkan dilihat oleh sebagian orang Taiwan sebagai bukti adanya gerakan yang mencurigakan di dalam pemerintahan RRC.

Pada bulan Desember 2004, pemilihan legislatif Taiwan secara mengejutkan dimenangkan oleh koalisi *Pan-Blue*. Kemenangan ini berarti menghentikan berbagai peluang proklamasi kemerdekaan segera, dan juga akhirnya muncul pertanyaan apakah masih ada perkembangan dalam sentimen kemerdekaan Taiwan. Di luar semua itu, RRC melanjutkan pembahasan UU. Alasan utama yang diberikan kepada para diplomat barat adalah bahwa kepemimpinan RRC yakin bahwa kebijakan politiknya mengenai Taiwan di masa lalu telah menjadi lebih reaktif, artinya hanya disikapi dengan reaksi bukannya proaktif. Dan oleh karena itu, RRC merasa perlu untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai inisiatif daripada hanya bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa Beijing menunjukkan ketidakpercayaan yang teramat sangat terhadap Presiden Chen Sui-Bian. Banyak para ahli dari barat berpendapat bahwa sistem pengambilan keputusan RRC sangat kaku. Kemudian bahwa rencana-rencana yang sudah disiapkan untuk menghadapi kemenangan *Pan Green* telah sama sekali kehilangan momentum, atau dengan kata lain tidak dapat terlaksana. RRC yang telah menyusun rencana tersebut harus rela kehilangan momentum untuk memulai lagi pembicaraan dengan cara yang berbeda tentunya.

Ada berbagai macam penerjemahan atau peng-interpretasi-an nama UU Anti Pemisahan. Terjemahan resmi dari pemerintah RRC mengenai UU tersebut adalah UU Anti Pemisahan, yang dimaksudkan adalah serupa undang-undang yang dipakai kelompok Union Amerika Utara untuk menindak Konfederasi Selatan selama masa

perang sipil Amerika. Meskipun demikian, MAC tetap menerjemahkannya sebagai “UU Anti Pemberontakan” sebagai dampak anggapan RRC bahwa Taiwan adalah bagian Cina. MAC dan pemerintah Taiwan telah menyatakan bahwa hubungan lintas selat Taiwan tidak dapat dibandingkan dengan situasi perang sipil Amerika. Mereka berpendapat bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian RRC. Terjemahan versi MAC ini tidak ditemukan di media internasional.

Sebelumnya, Cina memberikan kelonggaran kepada Taiwan dalam tawaran mereka dengan mengajukan konsep *One China, Two System* (Satu Cina, dua Sistem) dengan nama Republic-People’s Republic of China. Contoh proyek diterapkannya sistem tersebut seperti di Hong Kong dan Macau, ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Taiwan dan rekonsiliasi politik antara Partai_Komunis Cina dengan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRC. Dilanjutkan dengan naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRC dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Taiwan menolak tawaran RRC “dengan halus”.

Satu Negara, Dua Sistem adalah sebuah gagasan yang diajukan secara resmi oleh Deng Xiaoping, pemimpin RRC, untuk proses unifikasi Cina. Pada tahun 1984, Deng mengajukan permintaan untuk menerapkan usulannya kepada Hong Kong

dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Margaret Thatcher mengenai masa depan Hong Kong ketika Pendudukan Inggris atas Hong Kong dan New Kowloon habis pada 1997. Usulan tersebut adalah setelah dicapai reunifikasi, selain praktek sosialisme di daratan Cina, Hong Kong dan Macau yang sebelumnya adalah koloni Kerajaan Inggris dan Portugis, dapat melanjutkan praktek kapitalisme dalam tingkatan otonomi yang lebih luas untuk 50 tahun masa setelah itu. Artinya nantinya Hong Kong, Macau dan Taiwan akan menjadi bagian dari Negara RRC dengan pelaksanaan otonomi yang lebih luas.

B. Isi Undang-undang Anti Pemisahan

Undang-Undang Anti pemisahan (secara bahasa: UU Anti Pemisahan Negara) disetujui oleh Komisi III Kongres Rakyat Nasional ke-10 negara Cina²¹. Kemudian diratifikasi pada bulan Maret tanggal 14 2005. Presiden RRC Hu Jintao mengumumkan UU tersebut dengan Keputusan Presiden no. 34. UU itu memuat berbagai kontroversi karena (sepertinya) menerbitkan kebijakan lama RRC untuk menggunakan “cara-cara non-damai” melawan “Gerakan Kemerdekaan Taiwan” jika dan ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan.

Undang-undang anti-pemisahan disetujui dengan voting 2.896 berbanding nol dengan dua abstain, pada pertemuan tahunan National People’s Congress. Persetujuan tersebut sudah diduga karena parlemen secara rutin menyetujui semua peraturan yang

²¹ *ibid*

sudah diputuskan pemimpin komunis. “Kita harus mempersiapkan kemungkinan perjuangan militer dan meningkatkan kapabilitas untuk mengatasi krisis, pengamanan perdamaian, mengatasi perang dan memenangkan pertempuran jika terjadi,” kata Hu Jintao.²²

Adapun isi UU Anti Pemisahan:

1. Undang-undang ini disusun dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, untuk tujuan menentang dan meninjau kembali pemisahan Taiwan dari Cina yang dilancarkan oleh penggerak kemerdekaan yang mengatasnamakan “Kemerdekaan Taiwan”, mempromosikan reunifikasi nasional secara damai, mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah seluruh Cina, dan menjaga kepentingan bangsa Cina.
2. Hanya ada satu Cina di muka bumi. Kedua wilayah yaitu Cina daratan dan Taiwan adalah milik satu Cina. Kedaulatan dan integritas wilayah Cina tidak dapat ditawar. Menjaga dengan ketat kedaulatan dan integritas wilayah Cina adalah kewajiban dasar setiap warga negara Cina, termasuk warga negara Taiwan. Taiwan adalah bagian dari Cina. Negara tidak boleh membiarkan persatuan gerakan “Kemerdekaan Taiwan” memisahkan diri dari Cina dengan nama apapun dan dengan cara apapun.
3. Persoalan Taiwan adalah satu persoalan yang tersisa setelah masa Perang

²² kantor berita pemerintah Xinhua, Minggu 13/3/2005

Saudara Cina.

Menyelesaikan persoalan dan mencapai reunifikasi nasional adalah urusan dalam negeri Cina dimana semua pihak yang terlibat didalamnya tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun dari luar.

4. Menyelesaikan tugas mulia menyatukan ibu pertiwi adalah tugas suci seluruh bangsa Cina termasuk warga negara Taiwan.
5. Penegakan prinsip Satu Cina adalah dasar reunifikasi kedua negara secara damai.

Untuk menyatukan kembali bangsa melalui cara damai berarti mengakomodasi kepentingan dasar kedua belah pihak di selat Taiwan dengan baik. Negara akan melaksanakan dengan ketulusan yang sesungguhnya untuk mencapai reunifikasi damai.

Setelah kedua negara bersatu dengan damai, Taiwan diperbolehkan menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda dari wilayah daratan dan menerapkan otonomi khusus seluas-luasnya.

6. Dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan menciptakan hubungan lintas selat, negara akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

(1) Mendorong dan memfasilitasi pertukaran warga negara melintasi Selat untuk pengertian saling menguntungkan dan kepercayaan yang saling menguntungkan,

- (2) Mendorong dan memfasilitasi pertukaran dan kerjasama ekonomi, menrealisasikan jaringan langsung perdagangan, surat-menyurat dan pelayanan transportasi udara serta laut, dan menciptakan ikatan ekonomi yang lebih erat antara kedua belah pihak dari Selat untuk keuntungan bersama,
 - (3) Mendorong dan memfasilitasi pertukaran lintas selat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kesehatan dan olahraga, dan bekerjasama untuk bersama-sama membawa kebanggaan tradisi kebudayaan Cina,
 - (4) Mendorong dan memfasilitasi kerjasama lintas selat dalam memerangi kejahatan,
 - (5) Mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan lain yang kondusif terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan hubungan lintas selat yang lebih kuat. Negara melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara Taiwan sesuai hukum yang berlaku.
7. Negara mendukung pencapaian reunifikasi damai melalui konsultasi dan negosiasi pada derajat yang sama antara kedua belah pihak di Selat Taiwan. Pembicaraan dan negosiasi ini dapat dilakukan dalam langkah-langkah dan tahap-tahap dan dengan berbagai cara yang fleksibel. Kedua belah pihak Selat Taiwan diperbolehkan berbicara dan berunding dengan pembahasa-pembahasan sebagai berikut:

- (1) Secara resmi mengakhiri keadaan perlawanan antara kedua belah pihak
 - (2) Mengatur pembentukan hubungan lintas selat,
 - (3) Langkah-langkah dan pengaturan untuk reunifikasi nasional secara damai,
 - (4) Status politik otoritas Taiwan,
 - (5) Ruang gerak Taiwan di berbagai organisasi internasional yang sesuai dengan statusnya,
 - (6) Persoalan lain yang berkaitan dengan tercapainya reunifikasi nasional secara damai.
8. Pada peristiwa apapun bahwa pasukan pemberontak “Kemerdekaan Taiwan” melakukan gerakan dengan nama atau cara apapun yang dapat menyebabkan pemisahan Taiwan dari Cina, atau bahwa terjadi peristiwa yang berujung pada pemisahan Taiwan dari Cina, atau tidak ditemukannya lagi segala kemungkinan untuk reunifikasi damai, negara akan meluncurkan tindakan keras dan cara-cara lainnya yang perlu dilakukan untuk melindungi kedaulatan Cina dan integritas wilayah. Dewan Negara dan Komisi Militer Pusat akan mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan keras dan cara lain yang perlu dilakukan mengenai hal tersebut di atas dan akan terus menerus melaporkan kepada Komite yang berwenang dari Kongres Rakyat Nasional.
9. Pada peristiwa menggunakan dan melaksanakan tindakan keras dan cara

lain yang perlu dilakukan mengenai hal-hal kemerdekaan yang tersebut dalam Undang-undang ini, negara akan melaksanakan tindakan semaksimal mungkin untuk melindungi kehidupan, kepemilikan dan hak-hak serta kepentingan lainnya dari warga negara Taiwan dan warga negara asing di Taiwan, dan meminimalisir kerugian. Pada waktu yang sama, negara akan melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara Taiwan seluruh wilayah Cina menurut hukum yang berlaku.

10. Undang-undang ini akan diberlakukan disertai tindakan pada proklamasi kemerdekaan Taiwan.²³

Berikut penjelasan isi UU Anti Pemisahan:

- Pasal Satu, negara-negara yang dimaksudkan dalam UU disarankan untuk menghentikan dukungan kepada gerakan kemerdekaan Taiwan yang akan menuai perpecahan negara, menuju arah reunifikasi. Menstabilkan wilayah Selat Taiwan dan menjaga kepentingan *Zhonghua Minzu* juga menjadi tujuan UU. Pasal ini kemungkinan juga ditujukan untuk siapa saja yang mendukung pemisahan Taiwan dari Cina seperti Amerika Serikat dan sekutu.
- Pasal dua sampai empat menggaris-bawahi pandangan pemerintah RRC mengenai status politik terkini Taiwan. Pandangan ini adalah bahwa daratan raya dan Taiwan merupakan satu Cina dan bahwa hanya ada satu

²³ <http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/ffl/810447.htm> ; access date 30 Januari 2007

Cina dan bahwa kedaulatan Cina bersatu tersebut tidak dapat ditawar. Sedangkan “Persoalan Taiwan” adalah masalah yang tersisa dari Perang Sipil Cina dan merupakan urusan dalam negeri Cina. Pandangan ini juga menjadi kebijakan politik luar negeri menyangkut persoalan Taiwan. Terutama seperti telah dijelaskan diatas berkaitan dengan terpilihnya kembali Chen Sui-Bian menjadi presiden Taiwan. Arah kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan untuk menyokong kemenangan koalisi Pan Green menjadi berubah sama sekali. Oleh karena itu dalam pasal kedua Pemerintah mencantumkan kalimat “Hanya ada satu Cina, dan Taiwan adalah bagian dari Cina”. Dan memang seiring dengan kebangkitan Cina dalam bidang ekonomi, kebijakan PLN pemerintah mengenai Taiwan menjadi lebih keras.

- Pasal lima mempertahankan prinsip Satu Cina yang menjadi dasar penyelesaian persoalan, dan bahwa negara harus mencari segala kemungkinan reunifikasi damai. Bagian ini juga menjelaskan bahwa setelah reunifikasi damai, Taiwan akan menikmati otonomi seluas-luasnya dan menjalankan pemerintahan dengan sistem yang berbeda dengan daratan. Walaupun hal ini kelihatannya hampir sama dengan skema “*one country, two systems*”, yang sangat tidak diinginkan Taiwan, apa yang dijelaskan tidak dinamakan sedemikian rupa. Terlebih, UU itu tidak secara eksplisit mengkaitkan “Cina” dengan RRC (disebut

didalamnya “Negara”). Pemerintah RRC memang ingin tetap mempertahankan prinsip tersebut, namun dibahasakan dalam pasal kelima ini dengan kalimat yang lebih halus. Seperti sudah diterapkan di Hong Kong dan Macau, konsep inilah nantinya akan diterapkan juga di Taiwan.

- Pasal Enam berkaitan dengan hubungan lintas selat. Dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan untuk menjalankan hubungan lintas selat, negara harus: (1) Mendorong kontak antara rakyat dan rakyat untuk menghasilkan hubungan dan pemahaman yang lebih erat, (2) Mendorong perdagangan dan ekonomi lintas selat, (3) Mendorong pertukaran ilmu dan kebudayaan, (4) Bekerjasama memerangi kejahatan dan, (5) Mendorong adanya upaya untuk mencapai dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
- Pasal Tujuh berisi negosiasi langsung dan bersilang. Pasal ini menyatakan bahwa negara akan mendukung berbagai negosiasi dan pembicaraan bagi kedua belah pihak dengan status yang sejajar, dengan cara yang berbeda, dan dalam tingkatan yang hierarkis. Topik pembicaraan dapat termasuk (1) Mengakhiri keadaan bersitegang lintas selat (2) Menciptakan aturan hubungan lintas selat (3) Maksud-maksud menciptakan unifikasi (4) Status politik otoritas Taiwan (5) Tujuan yang

perlu dimana Taiwan dapat ikut berpartisipasi di organisasi internasional, dan (6) Isu-isu lain yang berkaitan dengan reunifikasi. Terdapat beberapa aspek penting dari pasal ini. Pertama, ini adalah pertama kali RRC secara resmi membicarakan perundingan antara daratan dan Taiwan mengacu pada arti status sejajar. Kedua, syarat yang diterima Taiwan mengenai berbagai bentuk prinsip Satu Cina tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks, dan pernyataan bahwa pembicaraan-pembicaraan dapat berlangsung dalam cara yang berbeda dan dalam tingkatan yang berbanding terbalik berarti bahwa Beijing bersedia memulai paling tidak pembicaraan informal tanpa memerlukan komitmen Satu Cina.

- Pasal Delapan berisi tindakan yang lebih keras, dan pasal inilah yang menyebabkan kontroversi dan perhatian lebih. Pasal ini menyatakan bahwa negara akan menggunakan cara-cara keras jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) Jika “kemerdekaan Taiwan” dipaksakan, dibawah apapun itu namanya dan dengan cara bagaimanapun, mengarah kepada kenyataan pemberontakan Taiwan dari daratan atau, (2) jika terjadi peristiwa yang akan mengarah kepada pemberontakan Taiwan dari Daratan, (3) atau jika segala kemungkinan unifikasi damai sudah tidak ditemukan lagi. Pasal ini secara umum bersifat mengancam jika terjadi hal-hal yang berbau kemerdekaan seperti tertulis diatas. Namun tidak disebutkan secara spesifik tindakan apa saja yang akan dilakukan

mengenai hal tersebut. Namun tetap terdapat kemungkinan meletusnya perang sipil jika memang Taiwan tetap menginginkan kemerdekaannya.

- Pasal Sembilan menyatakan bahwa, dalam perencanaan dan implementasi “Tindakan tegas dan lainnya”, negara diharuskan dengan segala cara bertindak untuk melindungi orang-orang dan kepemilikan *rakyat* Taiwan dan pendatang di tanah Taiwan, dan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita. negara juga harus melindungi kepentingan rakyat Taiwan yang ada di daratan. Tidak ada semacam penunjukan yang dibuat untuk UU Anti Pemisahan ini, konsisten dengan pernyataan pemberitaan negara bahwa UU ini tidak akan diberlakukan di Hong Kong atau Macau. Nampaknya, kekhawatiran akan pecahnya perang yang “menghancurkan” kedua belah pihak terpatahkan di pasal ini. Pemerintah Cina yang walaupun sangat tidak menginginkan kemerdekaan Taiwan, dalam pelaksanaan tindakannya terhadap Taiwan masih sangat berhati-hati. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya tekanan dunia internasional terhadap Cina jika memang mereka menyerang Taiwan. Isu pelanggaran HAM dan kejahatan perang tetap masih ditanggapi serius oleh pemerintah Cina.
- Pasal Sepuluh adalah momentum pelaksanaan ancaman Cina terhadap kemerdekaan Taiwan. Dapat dipastikan disini bahwa Cina memang secara serius menangani persoalan kemerdekaan Taiwan. Hal ini

ditunjukkan dengan antara lain perumusan pasal sepuluh tersebut. Jika Taiwan merdeka, maka pasal ini akan dijadikan dasar pembenaran penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan.

Dirilisnya UU ini seperti diketahui bersamaan dengan tahun ke-2 peningkatan anggaran pertahanan dan militer Cina. Dari pasal pertama sampai terakhir Cina ingin menekankan sebuah keharusan adanya unifikasi damai atau tidak sama sekali. Kebijakan pemerintah Cina dalam hal ini bukan hal yang baru. Hanya saja kebijakan mereka kali ini memang lebih keras dibanding sebelumnya. Disahkannya UU ini dapat diartikan pemerintah Cina tetap ingin mempertahankan pendapat bahwa Taiwan tidak boleh merdeka, bagaimanapun caranya.

BAB IV
TINDAKAN TAIWAN MENGHADAPI UNDANG-UNDANG ANTI
PEMISAHAN

Apa yang dikenal dengan “Kebangkitan Cina” pada dasarnya mengacu kepada bertambah besarnya pengaruh dan status ekonomi Cina di percaturan internasional. Namun demikian, persepsi yang berkembang sekarang ini mengenai hal tersebut disamakan dengan konsep “Ancaman Cina”. Anggaran militer Cina bertambah sebesar sepuluh persen per tahun sejak 1996. Pada tahun 2005, anggaran militernya sudah mencapai 30 milyar Dollar AS. Cina juga sedang mengembangkan persenjataan mereka secara besar-besaran melalui berbagai penelitian dan pengembangan. Mereka juga meluncurkan persenjataan strategis mereka. Misalnya ICBM (Inter-continental Ballistic Missiles) DF-31 dan JL-2 dan kapal selam nuklir yang memiliki daya jelajah taktis sampai India, Rusia, Australia, Selandia Baru dan bahkan seluruh daratan AS.²⁴ Sampai pada titik dimana UU Anti Pemisahan disahkan oleh Cina, Taiwan khususnya menganggap bahwa UU tersebut, dikaitkan dengan perkembangan ekonomi Cina, akan menambah ketegangan dan rusaknya hubungan Beijing dan Taipei yang sudah memang renggang.

Taiwan sebagai negara lebih lemah dibandingkan Cina, dan juga dalam kebijakan UU Anti Pemisahan, harus menghitung ulang keinginannya untuk mendapatkan kedaulatan dengan kemerdekaan. Taiwan harus melihat kembali

²⁴ U.S. Defense Ministry's 2005 Report on the Military Power of the People's Republic of China

persoalan apa dan juga siapa pihak yang dihadapi. Langkah akomodasi adalah pilihan yang paling mungkin untuk diambil oleh pemerintah Taiwan. Misalnya, Taiwan akan berusaha mendapatkan dukungan dari komunitas internasional seperti Uni Eropa untuk setidaknya meredakan ketegangan politik di kawasan Lintas Selat. Dalam menghadapi taktik Cina yang mempertahankan motif politiknya melalui berbagai perubahan, pemerintah Taiwan harus menerapkan manajemen kebijakan menyesuaikan dengan perubahan situasi di Selat Taiwan dengan pertimbangan stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Banyak langkah dan jalur yang ditempuh Taiwan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berhadapan dengan UU Anti Pemisahan tersebut.

A. Mencari Dukungan dari Uni Eropa

Baru-baru ini, Presiden Chen menyatakan di depan publik seruan kepada dunia internasional untuk bersama-sama berpadu dalam sebuah kerjasama yang aktif untuk menciptakan *balance of power* yang baru di Selat Taiwan. Kekuatan penyeimbang di Selat Taiwan diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi di Taiwan tidak terancam atau dihancurkan oleh Cina dengan cara yang tidak masuk akal. Pada saat yang sama, Taiwan harus bekerjasama dengan anggota komunitas demokrasi global lainnya membantu Cina membangun demokrasi, dan mencari cara untuk normalisasi hubungan dan melanjutkan pembicaraan dengan Cina dibawah “kerangka perdamaian dan stabilitas untuk interaksi Lintas Selat”. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.

Presiden Chen Sui-Bian berpidato melalui *videoconference* dengan anggota parlemen Uni Eropa (UE) pada tanggal 1 Maret 2005, salah satunya mencari dukungan dari UE untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Cina atas pengesahan UU Anti Pemisahan. Presiden Chen menyatakan dalam pidatonya:

“...UU Anti Pemisahan adalah usaha terbuka dan unilateral untuk melemahkan keadaan status quo di Selat Taiwan, karena itu akan memberi dasar legal bagi Cina untuk menentukan keadaan status quo dan mengizinkan Beijing menjadi arbitrator sekaligus pihak yang berkuasa. Tindakan ini memberi dampak negatif bagi upaya Taiwan untuk normalisasi hubungan lintas selat, serta mengakibatkan tantangan hebat terhadap keamanan, perdamaian dan keteraturan di kawasan Asian Pasifik. Pertikaian di Selat Taiwan harus diselesaikan dengan perundingan dan cara-cara damai. Ini adalah harapan bersama dari komunitas internasional, dan juga banyak negara termasuk AS, Jepang dan Uni Eropa, semua pihak telah berulang kali menyatakan hal yang sama. Taiwan, sebagai pembela setia keteraturan internasional dan penjaga demokrasi dan kebebasan, akan tetap memperluas cabang hal-hal tersebut ke Cina, seperti yang sudah dan sedang kami lakukan dalam 4 tahun terakhir. Pada saat yang sama, kita harus mengirimkan pesan tegas: Bahwa lebih dari 83% rakyat Taiwan menentang UU Anti Pemisahan. Oleh karena itu, Saya mengajak kepada negara-negara UE untuk mempertimbangkan tindakan pemerintah Cina yang menggunakan UU Anti Pemisahan sebagai cara untuk mengubah status quo secara sepihak di kawasan selat Taiwan. Saya juga meinta dukungan dari semua pihak untuk terwujudnya hubungan damai, rekonsiliatif dan berniat baik antara Taiwan dan Cina...”²⁵

B. Pernyataan Pemerintah

Pemerintah Taiwan menganggap bahwa sejak dirilisnya, UU Anti Pemisahan mengandung berbagai macam kontroversi. Antara lain yang paling banyak ditekankan adalah anggapan bahwa UU tersebut ancaman terhadap perkembangan

²⁵ President Chen's Videoconference with Members of the European Parliament Published: March 1, 2005 Source: The Office of the President of the Republic of China

demokrasi, stabilitas kawasan Asia Pasifik dan pelanggaran HAM. Selain itu, ancaman militer Cina juga telah menjadi titik berat tersendiri karena pertumbuhannya yang semakin signifikan mengarah kepada penggunaan kekuatan pada hari proklamasi kemerdekaan Taiwan.

Disebabkan antara lain pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Taiwan mengeluarkan pernyataan berkaitan disahkannya UU Anti Pemisahan sebagai berikut:

1. Melalui *Mainland Affairs Council* (MAC) atau Dewan Urusan Cina Daratan Taiwan yang merupakan salah satu agen maupun kantor khusus di luar kementerian luar negeri Taiwan. MAC mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan ekonomi, terutama investasi luar negeri Taiwan di Daratan Cina. Oleh karena itu juga, MAC mempunyai kewenangan mewakili pemerintah Taiwan. Menanggapi pengesahan UU Anti Pemisahan, MAC atas nama pemerintah Taiwan mengeluarkan pernyataan resmi yang pada intinya menyatakan kedaulatan Republik Cina adalah milik 23 Juta jiwa rakyat Taiwan dan bahwa segala bentuk pelanggaran oleh otoritas Cina tidak akan ditolerir. Walaupun terjadi perlawanan keras dari rakyat di Taiwan, sikap skeptis, dan kekhawatiran serta kritik dari komunitas internasional, pemerintah RRC telah dengan sengaja merubah keadaan status quo secara sepihak dengan mengesahkan peraturan yang disebut “tindakan non-damai” melawan Taiwan. Hal ini menurut MAC secara langsung mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Mempertimbangkan adanya provokasi yang serius dan usaha

untuk menyabotase perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan, pemerintah menyatakan protes terhadap pemerintah Cina. Selain daripada itu Taiwan juga mengajak komunitas internasional untuk mengambil tindakan atas Cina.

Ketua MAC, Joseph Wu, melalui wawancara di media menyatakan dengan tegas bahwa UU Anti Pemisahan adalah “tindakan provokatif yang mengancam perdamaian dan stabilitas”. Lebih jauh lagi ia menyatakan bahwa provokasi semacam itu akan mengancam keamanan kawasan Asia Pasifik.²⁶

Lebih detil MAC menyatakan bahwa:

a. Status quo berarti Republik Cina mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan

Republik Cina adalah negara merdeka dan berdaulat yang kedaulatannya berada ditangan 23 juta rakyat Taiwan. Hanya 23 juta rakyat Taiwan yang berhak memutuskan terhadap status Negara dan masa depannya. Taiwan tidak berada dibawah yurisdiksi pemerintah RRC. Hal ini adalah posisi umum eksplisit rakyat Taiwan. Republik Cina dan RRC tidak memiliki yurisdiksi terhadap satu sama lainnya. Hal ini telah menjadi status quo di Selat Taiwan sejak lama.

Pemerintah Cina telah mewujudkan khayalan *One China Principle* menjadi undang-undang yang dengan jelas menyatakan bahwa

²⁶ Kapanlagi.com access date: Maret 2006

unifikasi adalah “kewajiban hukum dan tanggung jawab mulia rakyat Taiwan”, sehingga mengubah keadaan *status quo* di Selat Taiwan secara sepihak. Provokasi serius semacam ini tidak hanya mengganggu pembangunan hubungan lintas selat, namun juga membawa luka yang emosional kepada rakyat Taiwan, melarang kebebasan dan demokrasi Taiwan, dan memiliki dampak keamanan yang serius di kawasan Asia Timur.

b. Perdamaian adalah solusi terbaik dalam persoalan Lintas Selat

Pada tahun-tahun terakhir, pertumbuhan Cina dalam pengeluaran militer dan bertambahnya penggunaan instrumen militer dengan sasaran Taiwan telah menjadikan retorika “mewujudkan perdamaian dengan giat” menjadi tidak lebih dari lelucon belaka. Hal ini juga telah menjadi penyebab serius instabilitas di Asia Timur, yang dicermati oleh komunitas internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, otoritas Cina telah dengan bangganya menyatakan bahwa UU Anti Pemisahan memberikan dasar legal untuk mengambil “langkah-langkah non-damai melawan Taiwan”. Pada waktu yang sama, pasalnya sendiri tidak masuk akal dimana seolah memberikan cek kosong kepada *People's Liberation Army (PLA)* untuk menyerang Taiwan. Tindakan non-damai Cina sudah pasti akan melanggar hak-hak dasar rakyat Taiwan. Sebaliknya, di saat yang

sama pemerintah Cina menyatakan dengan tanpa ragu keinginan “memberikan harapan kepada rakyat Taiwan”, dan akan melindungi rakyat Taiwan bahkan ketika mereka menyerang. Kontradiksi semacam ini telah menyulut kemarahan diantara rakyat Taiwan.

c. Sifat Otoriter rezim Komunis Cina mengakibatkan ancaman hebat terhadap stabilitas kawasan

Pemerintah Cina telah berkali-kali menyatakan akan tetap memberikan harapan bagi rakyat Taiwan, namun pada kenyataannya berlawanan dengan tindakan mereka yang membawa luka emosional bagi rakyat Taiwan. Hal ini jelas bahwa penyebab utamanya adalah rezim otoriter Cina kurang memahami dan kurang menghargai kebebasan dan demokrasi. Jelas pula bahwa tanpa demokratisasi menyeluruh di Cina, tidak mudah bagi otoritas Cina untuk memahami Taiwan. Pada akhirnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan ekspansi militer maupun meninggalkan penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi Taiwan. Oleh karena itu, akan sulit untuk mempertahankan perdamaian hakiki dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah Cina seharusnya menyadari bahwa kebebasan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah menjadi nilai-nilai umum. Mereka harus segera mengimplementasikannya melalui reformasi politik dan

memberikan peluang penyelesaian damai persoalan lintas selat, serta membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan Asia Pasifik.

d. Perdamaian dan Pembangunan tetap menjadi inti Kebijakan Lintas Selat

Taiwan adalah anggota komunitas internasional yang bertanggungjawab, dan selama ini bersikap demikian. Ketika Presiden Chen Sui-bian memerintah untuk kedua kali, ia berjanji bahwa inti kebijakan lintas selat adalah perdamaian dan pembangunan. Presiden Chen menegaskan dalam pidato resmi kenegaraan sehari setelah disahkannya UU Anti Pemisahan bahwa “rekonsiliasi bukan berarti mundur, sedangkan bertahan bukan berarti melawan”²⁷. Demikian pula halnya posisi MAC dalam hal hubungan lintas selat. Bahkan ketika otoritas Cina dengan sengaja menciptakan gangguan di selat Taiwan, Taiwan akan tetap mempertahankan prinsip untuk memenuhi tanggungjawab sebagai anggota komunitas internasional, termasuk menjaga mempertahankan perdamaian dan memperluas kebebasan, demokrasi dan HAM.²⁸

MAC pada bulan Oktober 2005 juga mengeluarkan beberapa penilaian mengenai persolan Lintas Selat.

²⁷ The Office of the President of the Republic of China

²⁸ Published: March 14, 2005 Source: Mainland Affairs Council

a. Membangun kesadaran bahwa Taiwan harus berpartisipasi di “Komunitas Demokrasi” internasional.

”Kebangkitan Cina” sebenarnya terbangun dari berbagai macam faktor, misalnya sebagai daya tarik ekonomi Cina, meningkatnya kemampuan ekonomi dan perdagangan yang pesat, perluasan kekuatan militer, potensi kekacauan sosial, sistem pemerintahan otokratik, dan jurang yang makin lebar antara orang kaya dan miskin serta antara kota dan desa. Namun bukan itu yang menjadi fokus Taiwan, melainkan cepatnya pertumbuhan ekonomi Cina dan kemungkinan aneksasi Taiwan oleh Cina.

Cina masih berada dibawah rezim pemerintahan otokrasi yang didapatkan dari ideologi totalitarianisme komunis. Dalam hal hubungan lintas Selat, mengacu kepada fakta bahwa kedua belah pihak masih berbicara dengan bahasa yang sama dan masih merupakan satu ras etnik, rakyat cenderung mengabaikan perbedaan mengenai sistem politik dan cara berpikir kedua belah pihak. Padahal, hubungan perdagangan dan ekonomi lintas Selat telah berkembang lebih mendekatkan secara kultural, seperti halnya pendidikan serta pertukaran budaya telah menjadi lebih banyak. Maksud politis Cina terhadap Taiwan tidak pernah berubah. Perkembangan ekonomi dan

pengaruh politiknya di dunia internasional menjadi kekuatan tawar untuk “me-reunifikasi-kan” Taiwan. Dengan cara-cara tersebut, Cina telah mengancam stabilitas dan perdamaian di Lintas Selat. Situasi tersebut harus dijelaskan dan dikomunikasikan melalui beragam jalur sehingga dicapai pemahaman dan konsensus yang menyeluruh di Taiwan.

Untuk menghasilkan arti positif perdamaian di kawasan Asia Timur dan di komunitas internasional, “Kebangkitan Cina’ harus didampingi oleh dua hal “Kebangkitan damai” dan “pembangunan demokrasi”. Komunitas internasional masih menganggap kemajuan Cina adalah ancaman terbesar. Taiwan harus membuat semua negara memahami peran penting yang Taiwan mainkan dalam arus kebangkitan Cina. Hal ini dikarenakan mempunyai pertahanan lini depan menghadapi aksi militer Cina. Lebih penting, pembangunan demokrasi Taiwan dapat juga memberikan referensi ideal dan model bagi Cina menuju kearah demokratisasi.

b. Memperkuat kemampuan Pertahanan dan mencari dukungan menghadapi serangan militer Cina

Cina secara aktif melakukan modernisasi militernya dengan mengadakan penelitian dan pengembangan, membeli persenjataan

baru, dan merestrukturisasi organisasi militernya. Kini, Cina adalah superpower militer di Asia Timur. Sudah diketahui oleh umum bahwa persiapan militer Cina diarahkan ke Taiwan. Dalam sebuah usaha mencapai maksud-maksud politiknya, Cina mencari jalan “menggunakan kekuatan untuk mempercepat reunifikasi” dengan memasukkan tekanan militer ke Taiwan. Cina bahkan ingin mengambil jalan menggunakan kekuatan militer ke Taiwan untuk mencapai apa yang mereka sebut “unifikasi Ibu Pertiwi”.

Jika dibandingkan anggaran pertahanan Cina dengan pertumbuhan ekonominya, kita akan mendapatkan bahwa anggaran militernya naik pada tahun-tahun terakhir pada angka yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi tahunannya. Sejak 1996, anggaran pertahanan per tahun Cina berkembang pada angka dua digit, bahkan mencapai kisaran 17 – 18 persen per tahun sejak 1998 sampai 2001. Dengan angka ini, Anggaran pertahanan Cina sudah berjumlah tiga kali lipat Taiwan. Momen yang paling mungkin memicu perang di seberang Selat Taiwan adalah ketika Cina menganggap kekuatan militernya sudah cukup kuat untuk melancarkan serangan ke Taiwan sebelum Pasukan penyelamat internasional datang.

Menghadapi ketidakseimbangan kekuatan militer di seberang Selat, kita harus terus menerus menguatkan dan mempererat kemampuan pertahanan. Kita harus membeli Alutsista yang cocok dengan kebutuhan kita mempertahankan Taiwan untuk membatalkan Cina menggunakan kekuatannya. Mempertahankan keseimbangan militer di kawasan lintas selat dan membatalkan upaya Cina menggunakan kekuatannya adalah langkah terbaik untuk melestarikan perdamaian di kedua belah pihak Selat Taiwan.

c. Mengambil tindakan yang perlu untuk mengatur pertukaran Lintas Selat

Menghadapi eksploitasi Cina dalam hal hubungan Lintas Selat untuk mencapai cita-cita politiknya, pemerintah harus membuat sebuah pertimbangan yang menyeluruh akan lingkup dan tingkatan pembukaan hubungan Lintas Selat dengan pandangan mempertahankan stabilitas sosial dan keamanan nasional. Namun, penyusunan rencana dalam mengatur hubungan Lintas Selat terkini harus diperhatikan dengan hati-hati.

d. Terlibat secara aktif dalam berbagai perbincangan tentang keamanan regional dan kerjasama strategis

Dalam rangka melestarikan stabilitas dan keamanan regional, negara-negara tetangga telah disiagakan akan pertumbuhan politik, ekonomi dan militer Cina yang pesat. Secara bertahap mereka juga telah meningkatkan kerjasama strategis regional dan menciptakan mekanisme dialog. Hal ini bertujuan membuat para negara tetangga bisa secara mandiri merumuskan tindakan yang terbaik menyesuaikan dengan kepentingan pembangunan kawasan dan menghadapi tantangan baru yang diciptakan oleh “kebangkitan Cina”. Sebagai anggota komunitas Asia Pasifik, Taiwan juga pendukung setia upaya-upaya mempertahankan keadaan status quo yang damai dan stabil di kawasan tersebut. Kita tidak hanya mengadakan kontak dan dialog dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik saja, tetapi harus juga lebih jauh mengadakan hubungan kerjasama strategis pada saatnya ketika “kebangkitan Cina” mengarah kepada ketidakpastian keamanan kawasan. Hal ini bertujuan mengusahakan dengan sendirinya masing-masing negara melakukan pertukaran yang lebih detil lagi berkaitan dengan penilaian mereka terhadap situasi di Cina dan berlaku sebagai platform untuk diskusi dalam melestarikan keamanan dan kesejahteraan regional.

e. Bekerjasama dengan komunitas internasional dalam menciptakan arah demokrasi bagi Cina

Antara lain melalui seruan yang dinyatakan Presiden Chen di parlemen UE. Karena bagaimanapun, pertumbuhan Cina masih dianggap ancaman oleh dunia pada umumnya dan oleh Taiwan pada khususnya.

2. Kantor kepresidenan menerbitkan pernyataan resmi dari Presiden Chen yang berpendapat bahwa tindakan Cina mengganggu proses demokratisasi dan stabilitas di kawasan Asia Timur. Lebih lanjut, diarahkannya sejumlah rudal yang diarahkan ke Taiwan dianggap merupakan tindakan implementasi awal UU Anti Pemisahan. Kebijakan pemerintahan presiden Chen yang pro-kemerdekaan mendapat ganjalan keras atas tindakan Cina ini.

UU Anti Pemisahan adalah usaha terbuka dan unilateral untuk melemahkan keadaan status quo di Selat Taiwan, karena itu akan memberi dasar legal bagi Cina untuk menentukan keadaan status quo dan mengizinkan Beijing menjadi arbitrator sekaligus pihak yang berkuasa. Tindakan ini memberi dampak negatif bagi upaya Taiwan untuk normalisasi hubungan lintas selat, serta mengakibatkan tantangan hebat terhadap keamanan, perdamaian dan keteraturan di kawasan Asian Pasifik.²⁹

²⁹ President Chen's Videoconference with Members of the European Parliament Published: March 1, 2005 Source: The Office of the President of the Republic of China

Presiden Chen Sui-Bian mengeluarkan 6 (enam) pernyataan sikap berkaitan pengesahan UU Anti Pemisahan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2005³⁰:

- 1) Republik Cina adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu kedaulatan berada di tangan 23 juta jiwa rakyat Taiwan. Dan hanya mereka yang berhak menentukan masa depan negaranya. Hal ini menegaskan konsensus terbesar rakyat Taiwan mengenai persoalan kedaulatan dan masa depan negara Taiwan pada masa sekarang. Hal ini juga merupakan kesatuan sikap diantara pemerintah yang berkuasa dan partai oposisi. Jajak pendapat mengindikasikan bahwa lebih dari 90% rakyat Taiwan secara terbuka menyetujui pernyataan sikap penolakan ini. Jika pemerintah Cina Komunis masih menghendaki “memberi harapan kepada rakyat Taiwan”, mereka harus mendengarkan suara mayoritas rakyat Taiwan yaitu menerima fakta kemerdekaan Republik Cina, dan menghormati pilihan rakyat Taiwan untuk menentukan nasib mereka sendiri.
- 2) Proses pengajuan dan pengesahan UU Anti Pemisahan membuktikan adanya perbedaan institusional antara kedua belah pihak di Selat Taiwan. Kami tidak perlu menekankan besarnya perbedaan antara

³⁰Sumber: The Office of the President of the Republic of China

demokratis dan tidak demokratis, atau antara damai dan non-damai. Bagaimanapun solusinya bukan terletak pada perumusan draft UU Anti Pemisahan yang tidak demokratis dan cenderung untuk berperang. Kami menekankan bahwa perbedaan antara kedua belah pihak harus segera diselesaikan melalui perundingan berdasarkan prinsip demokrasi, kebebasan dan perdamaian. Setiap tindakan yang tidak demokratis atau non-damai, diluar rasionalitasnya, tidak akan ditolerir oleh dunia internasional dan hal tersebut akan hanya menambah buruk perpecahan dalam hubungan lintas selat dan semakin mendorong kedua belah pihak untuk lebih saling menjauh.

- 3) Selain luasnya penolakan oleh komunitas internasional dan berbagai pernyataan mengenai persoalan serius ini, pemerintah RRC yang keras kepala terus melaju tanpa adanya kesadaran atau kontrol diri untuk meloloskan undang-undang agresif tersebut. Bahkan ketika banyak komentar dari internasional yang menyatakan bahwa pengesahan UU ini adalah kesalahan fatal, otoritas Beijing tetap tidak menunjukkan sikap introspeksi. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada pemerintah Cina bahwa segala kebijakan yang mengarah pada penggunaan kekerasan untuk melanggar HAM dan kepentingan pihak lain, tidak peduli atas alasan atau pretensi apapun, sama saja dengan degradasi atau penurunan nilai-nilai kebebasan, demokrasi dan HAM universal serta kemunduran peradaban manusia.

- 4) Rakyat Taiwan menjunjung tinggi demokrasi dan perdamaian. Kami berkomitmen dan berkewajiban bergabung dengan komunitas internasional untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, perdamaian di Selat Taiwan, dan stabilitas kawasan. Sementara kami antusias menyambut tumbuhnya Cina yang stabil, di saat yang sama otoritas Cina juga harus menunjukkan kepada dunia akan “kesadaran perdamaian”. Sejak lama, Cina telah meningkatkan perseniataannya dan memasang lebih banyak rudal yang diarahkan ke Taiwan. Pengesahan UU Anti Pemisahan oleh Cina yang melegitimasi pemakaian kekuatan militer melawan Taiwan adalah sebuah sikap pembangkangan terhadap opini internasional. Tindakan tersebut tidak dapat diterima oleh negara manapun yang mendukung kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian serta tidak juga akan mendapat dukungan dari dunia internasional.
- 5) Pengesahan UU Anti Pemisahan oleh pemerintah Cina yang merubah keadaan status quo di Selat Taiwan, telah meningkatkan tekanan di kawasan dan ancaman gangguan internasional. Lebih jauh, hal tersebut mengakibatkan dampak buruk terhadap hubungan lintas selat, yang sebelumnya sudah menuju kearah yang lebih baik. Sebagai pemimpin negara, saya membawa tanggung jawab yang besar untuk menjamin keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan saya sendiri akan dengan serius menangani situasi dan menanggapi

dengan hati-hati. Kami tidak akan merubah apapun yang menjadi sikap kami, “rekonsiliasi bukan menyerah, bertahan sambil menghindari konfrontasi”. Namun dalam menghadapi pendekatan otoritas Cina, terutama strateginya menawarkan sedikit bantuan sambil memberikan ancaman, rakyat Taiwan tidak akan tinggal diam dan tidak juga bersikap tidak tahu menahu. Sejak lama, kami senang berbagi pengalaman pembangunan di berbagai sektor dengan pihak seberang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara. Kenyataannya, apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat di seberang negeri adalah tiga produk istimewa milik Taiwan yaitu: sistem demokrasi, kebebasan penuh dan perlindungan HAM. Pada titik ini, kami juga takkan mengubah apapun.

- 6) Sejarah menunjukkan bahwa seseorang yang memilih untuk tetap diam atau menyingkir dapat membiarkan terjadinya ekspansi kekuatan jahat dan bahkan kerusakan. Seperti sekarang ini, adanya awan hitam di Selat Taiwan, tidak seorangpun dari kita boleh berdiam diri. Pada waktunya komunitas internasional berbicara satu bahasa. Demikian halnya dengan rakyat Taiwan (tidak pandang jenis kelamin, umur, pandangan politik, dan profesi) harus bersatu dan mengeluarkan pendapat. Parade “Melindungi Taiwan dengan demokrasi dan perdamaian” tanggal 26 Maret pengungkapan ekspresi paling damai, rasional, sederhana oleh rakyat Taiwan, dengan perkiraan satu juta

rakyat turun ke jalan untuk sama-sama memprotes disahkannya UU Anti Pemisahan yang agresif tersebut. Mereka akan meneriakkan jauh sampai ke seberang kepada pemerintah Cina: “lebih 2 ribu anggota Kongres Rakyat Nasional Cina tidak boleh memutuskan nasib 23 juta rakyat Taiwan. Hanya rakyat Taiwan yang boleh menentukan masa depan Taiwan yang bebas, demokratis dan damai.”

C. Pendapat Publik

Selain keluarnya berbagai pernyataan dari pemerintah, baik melalui presiden sendiri maupun dari kantor MAC, rakyat Taiwan juga mempunyai pendapat yang sama dengan berbagai pernyataan pemerintah. Setelah disahkannya UU Anti Pemisahan oleh Kongres Rakyat Nasional Cina, jurubicara Kabinet Taiwan mengatakan bahwa seluruh rakyat Taiwan menyatakan tidak menyetujui undang-undang tersebut beserta isinya yang provokatif dan dia menambahkan bahwa masyarakat dunia juga bersikap sama.³¹ Alasan yang dikemukakan juga senada, bahwa UU Anti Pemisahan tersebut hanya akan memperburuk situasi di Selat Taiwan, menghambat proses demokratisasi, perdamaian dan stabilitas.

Seperti sudah penulis paparkan juga diatas, pendapat yang berkembang kebanyakan ditekankan pada bahwa UU Anti Pemisahan dapat mengancam perkembangan demokrasi, perdamaian dan stabilitas kawasan serta pelanggaran

³¹ www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2005-03-14-8 access date Maret 2005

HAM berkaitan dengan pelanggaran kebebasan menentukan nasib sendiri. Pendapat publik di Taiwan berulang kali menunjukkan keinginan untuk mempertahankan perdamaian dan hubungan yang stabil, dirangkai dengan keinginan yang lebih besar untuk mempertahankan sistem demokrasi di Taiwan.

Rakyat melakukan sebuah aksi yang bertajuk “*Democracy and Peace to Protect Taiwan*” yang diadakan pada 26 Maret 2006. Aksi tersebut dilakukan atas keinginan rakyat Taiwan sendiri sebagai ekspresi menentang hasrat Cina menggunakan kekerasan yang tersirat dalam UU Anti Pemisahan. Terlebih lagi, aksi tersebut rakyat Taiwan dapat mengekspresikan kepada komunitas internasional keinginan mereka akan demokrasi dan perdamaian serta perlawanan mereka akan aneksasi Cina. Aksi tersebut memberikan pengaruh yang nyata bagi konsensus di dalam negeri.³²

Rakyat Taiwan harus mengakui apa yang disebut “kebangkitan Cina” berakar dari kekhawatiran tersembunyi yang muncul ke permukaan, ketimpangan pembangunan dan kekacauan sosial di Cina. Taiwan harus terus memperkuat dan membangun kekuatan pertahanan untuk menghindarkan Cina dari penggunaan kekuatan militer. Mempertahankan keseimbangan militer di Lintas Selat adalah langkah yang baik dalam rangka melanjutkan perdamaian di kawasan Lintas Selat. Mempersatukan kekuatan global “komunitas demokrasi”, dalam rangka usaha bersama menularkan demokratisasi di Cina. Taiwan dapat menggunakan proses

³² Published: March 26, 2005 Source: Mainland Affairs Council

tersebut dalam mengkonsolidasikan dan memperdalam demokrasi di tahun-tahun belakangan sebagai paradigma Cina, “Kebangkitan Damai” dan “Pembangunan Demokrasi”.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh gabungan beberapa organisasi di Taiwan yaitu antara lain Universitas Nasional Chengchi, Burke Marketing Research, Universitas Nasional Sun Yat-Sen dan lembaga survei dari universitas terkenal lainnya, dua bulan setelah disahkannya UU Anti Pemisahan menunjukkan sebanyak 37,3% responden menyatakan keinginan untuk mempertahankan status quo sementara menunda keputusan (untuk merdeka). Kemudian sebanyak 14,1% menyatakan mempertahankan status quo dan memerdekakan diri belakangan. Sementara yang masih mendukung kemerdekaan walaupun setelah disahkannya UU Anti Pemisahan sebanyak 5,2%, disusul pendukung unifikasi sebanyak 1,2%.³³

Unifikasi Cina sering dianggap sebagai ideologi di komunitas penduduk asli Taiwan, walaupun banyak juga pendatang yang mendukung unifikasi dan juga beberapa penduduk asli yang menentangnya. Bagaimanapun, proporsi penduduk asli yang mendukung unifikasi lebih banyak dibandingkan penduduk Taiwan sendiri. Partai-partai yang mendukung unifikasi sering memberi dukungan dengan alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan Lintas Selat. Lebih jauh,

³³ Public opinion on Cross-Strait relations in the Republic of China, MAC, Executive Yuan, Dec 2006. www.mac.gov.tw

pendukung fanatik unifikasi juga seringkali ragu kapan seharusnya dilakukan dan konsep unifikasi seperti apa yang harus diimplementasikan.

Jajak pendapat yang lain menunjukkan berkurangnya dukungan terhadap unifikasi dan meningkatnya dukungan terhadap kemerdekaan dalam dekade terakhir. Selama dekade-dekade terakhir jajak pendapat tetap menunjukkan bahwa 70-80% rakyat Taiwan mendukung mempertahankan keadaan status quo, meskipun definisi status quo masih terus diperdebatkan. Unifikasi menjadi isu yang didukung hanya sebanyak 10% rakyat Taiwan dan didukung oleh partai-partai yang kurang populer. *People First Party* secara resmi menyatakan bahwa Taiwan harus tetap mempertahankan status quo. Koumintang (KMT) sudah sejak dahulu mendukung kedaulatan Taiwan (RoC), sedangkan mereka tidak banyak membahas persoalan unifikasi. Walaupun kedua partai tersebut sering dipandang sebagai pendukung unifikasi Cina, dalam kasus-kasus tertentu mereka bertindak demikian hanya dalam arti tradisional saja. Perbedaan mendasar mereka dengan koalisi *Pan Green* adalah bahwa mereka percaya Taiwan harus lebih mengenali diri mereka sebagai Cina secara kultural, dan tidak menganjurkan perubahan identitas nasional. Hal ini menjadikan mereka lebih mendukung konsep unifikasi di masa depan. *One Country Two System* hanya didukung sebanyak 6-7% rakyat Taiwan. Persoalan yang mendasar untuk hal ini adalah keyakinan bahwa Taiwan, sebuah pulau yang kecil, sudah pasti tidak dapat menyaingi daratan, dan oleh karenanya lebih menguntungkan jika kembali bersatu sesegera mungkin.

Setelah pidato presiden tanggal 10 Oktober 2004, jajak pendapat menunjukkan hanya 5% dukungan untuk unifikasi dengan 60% dukungan mempertahankan status quo dan 65% menentang pembentukan Republik Taiwan pada tahun 2008 (spekulasi konsep reformasi konstitusi pada tahun 2006 yang diajukan Presiden Chen dalam pidatonya). Sebuah jajak pendapat independen yang dilakukan oleh *United Daily News* pada November 2004 (sebelum disahkannya UU) menunjukkan dukungan untuk status quo turun sebanyak 36%, sedangkan populasi yang mendukung kemerdekaan meningkat menjadi 21%.³⁴

Yang menjadi persoalan lain adalah belum ditemukannya definisi pasti status quo di Selat Taiwan. Berbagai pembicaraan mengenai hal ini juga mengalami jalan buntu. Menurut sebagian besar rakyat Taiwan, status quo yang mereka pahami negara mereka tidak memproklamkan kemerdekaan, tidak pula melakukan upaya-upaya unifikasi. Dengan tetap menjalin hubungan dengan daratan dalam bidang-bidang tertentu, mereka sudah merasa senang dengan keadaan semacam itu. Persoalan status quo menjadi semakin meruncing dengan adanya UU Anti Pemisahan karena pemerintah Cina mempunyai pemahaman tersendiri mengenai status quo. Pada pasal dua, Cina menyatakan “*Hanya ada satu Cina di muka bumi. Kedua wilayah yaitu Cina daratan dan Taiwan adalah milik satu Cina. Kedaulatan dan integritas wilayah Cina tidak dapat ditawar,...*”. Kemudian pada pasal lima, “*Setelah kedua negara*

³⁴ <http://www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp>

bersatu dengan damai, Taiwan diperbolehkan menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda dari wilayah daratan dan menerapkan otonomi khusus seluas-luasnya”. Kekhawatiran bangsa Taiwan mengenai pengartian status quo secara sepihak oleh Cina menjadi nyata dengan kedua pasal tersebut. Cina menghendaki implementasi prinsip *One China Two System*, dan sama sekali menolak kemerdekaan Cina. Hal ini jelas bahwa keadaan status quo semacam itulah yang dipahami oleh pemerintah Cina. Perbedaan interpretasi memang telah berlangsung sejak lama. Protes dari rakyat yang menolak substansi UU Anti Pemisahan terutama adanya kemungkinan penggunaan kekuatan militer menjadi titik berat persoalan walaupun kebanyakan mereka secara terbuka juga tidak menghendaki kemerdekaan segera.

Berbagai pernyataan dan permintaan akan pembicaraan damai dengan Cina cukup untuk menunjukkan bahwa rakyat dan pemerintah serta organ-organ pendukungnya satu suara dalam menghadapi UU Anti Pemisahan. Hal ini membuat Taiwan harus merumuskan sebuah tindakan yang logis dan realistis. Artinya, jika menurut tipologi John Lovell, Taiwan sampai saat sekarang harus benar-benar menghitung kemungkinan menghadapi RRC dengan kemampuan yang dimiliki. Sikap yang ditunjukkan Taiwan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi melalui MAC, kantor presiden, pidato presiden serta unjuk rasa dari rakyat seperti sudah dijelaskan diatas memang menunjukkan kemampuan Taiwan yang sangat terbatas untuk melawan Cina dari segi diplomasi terlebih lagi militer.

Kebijakan yang diambil pemerintah Taiwan tidak akan bersifat ofensif terhadap Cina. Yang paling mungkin dilakukan antara lain adalah meminta dukungan dari dunia internasional, memperkuat pertahanan dan militer terutama dari segi persenjataan, mengusahakan pembicaraan lebih lanjut untuk rekonsiliasi dengan Cina. Langkah-langkah tersebut dirasa paling mungkin karena mempertimbangkan kemampuan Taiwan dari segi pertahanan tidak akan mampu menahan serangan Cina seandainya dan bilamana hal itu terjadi. Selain itu untuk menghindari serangan militer Cina, Taiwan tidak akan memproklamkan kemerdekaannya paling tidak dalam waktu dekat ini.

Harus ada pergeseran mengenai apa yang diinginkan kearah apa yang harus dilakukan. Dari hasil jajak pendapat, mereka masih cenderung untuk menunda keinginan untuk merdeka dengan segera. Tren ini berlangsung sejak tahun 2000 dimana dalam lima tahun rata-rata penduduk yang menghendaki status quo sebesar 37,64%. April 2006 tercatat persentase paling tinggi yaitu 41,5%. Sedangkan pendukung kemerdekaan maupun unifikasi rata-rata kurang dari 11%³⁵.

³⁵ Public opinion on Cross-Strait relations in the Republic of China, MAC, Executive Yuan, Dec 2006. www.mac.gov.tw

BAB V

KESIMPULAN

Dalam menghadapi UU Anti Pemisahan RRC, Taiwan yang sebagai negara yang lebih lemah hanya dapat mengajukan protes-protes serta meminta adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut. Langkah-langkah Taiwan antara lain pidato permintaan dukungan Presiden Chen didepan parlemen Uni Eropa, pernyataan resmi MAC dan penilaian akan tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah, dan berbagai unjuk rasa dari publik Taiwan serta berbagai jajak pendapat mengenai persoalan unifikasi, status quo dan UU Anti Pemisahan.

Taiwan dengan kekuatan militer yang hanya sepertiga dari kekuatan militer Cina pastinya harus menghitung ulang rencananya untuk merdeka. Isu kemerdekaan telah menjadi kebijakan pemerintahan Chen Sui-Bian sejak terpilihnya pada tahun 2000. Keinginan Taiwan untuk merdeka didasari klaim mereka atas pemerintahan Cina walaupun mereka harus tersingkir dari daratan setelah kalah dari tentara Komunis. Tahun 1971 bahkan Taiwan dicabut keanggotaannya dari PBB karena pemerintah Republik dianggap tidak sah di Cina. Dengan kemampuan Taiwan yang sangat terbatas dibandingkan Cina, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan UU Anti Pemisahan, atau lebih jauh lagi mengkonfrontir Cina.

Dari segi hubungan dengan pemerintah Cina Daratan, Taiwan melakukannya melalui agen pemerintah diluar kementerian Luar Negeri yaitu *Mainland Affairs Council* (MAC) atau Dewan Urusan Cina Daratan. Dan berkaitan dengan posisi

politik Taiwan, dalam setiap pembicaraan mengenai persoalan lintas Selat, Taiwan selalu hanya diwakili oleh MAC. Hubungan politik diantara kedua belah pihak memang masih belum menemui titik temu pemecahan, namun dalam hal ekonomi hubungan mereka tetap berjalan. Taiwan bahkan menanamkan investasi yang cukup besar di daratan. Namun dalam hal ini, pemerintah Taiwan mempunyai peraturan khusus mengenai investasi Taiwan di daratan, yaitu penanaman modal asing tidak boleh melebihi 20% dari total aset perusahaan. Jadi, segala hubungan dengan Cina dan sebaliknya memang masih dilandasi sikap saling curiga.

Di pihak lain, Cina sejak dulu masih terus mempertahankan konsep *One Country Two Systems* kepada Taiwan seperti mereka telah terapkan di Hong Kong dan Macau. Berkali-kali Cina menawarkan unifikasi dengan bentuk otonomi khusus, berkali-kali juga Taiwan menolak dengan halus tawaran Cina. Menurut Taiwan, kemerdekaan adalah harga mati, kedaulatan mereka harus diakui di dunia. Dengan usulan tersebut, Republik Cina akan sama sekali tidak berfungsi. Diluar pemerintahan, dijalankan hubungan yang tidak terlalu formal seperti yang diusulkan di salah satu draft UU Usulan Unifikasi Nasional RRC. Tanggapan Taiwan atas tawaran RRC yang dianggap sepi oleh Taiwan akhirnya mengarah kepada pengajuan RUU Anti Pemisahan pada tahun 2004 yang antara lain berisi akan diberlakukannya kekuatan militer pada hari proklamasi Taiwan. UU tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan ekonomi dan perdagangan yang pesat yang kemudian berimbas pada kenaikan anggaran pertahanan sejumlah 46% sejak 2001, yaitu pada tahun perilisan RUU. Dalam UU tersebut juga tertulis bahwa unifikasi adalah harga yang tidak bisa

ditawar karena merupakan kewajiban semua warga Cina tak terkecuali Taiwan. Juga diatur didalamnya teknis pelaksanaan unifikasi dan serangan, jika dan hanya jika Taiwan nekat memproklamirkan kemerdekaannya. Cina juga memboikot upaya Taiwan untuk masuk kembali ke PBB. Berbagai usaha tersebut nampaknya tidak dapat dilawan oleh Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan sampai sekarangpun masih mengusahakan adanya pembicaraan dengan Cina mengenai persoalan Lintas Selat. Jika mengandalkan kekuatan militer dan pertahanan yang mereka punyai tetap melakukan proklamasi kemerdekaan, maka hanya dalam hitungan jam saja Taiwan akan hancur lebur.

Mengenai kontroversi yang dihasilkan oleh UU tersebut, Taiwan juga mengajak dunia internasional antara lain Uni Eropa untuk mengambil tindakan mendesak pembicaraan melalui jalur UE, dan jika perlu menjatuhkan sanksi kepada Cina. Taiwan menganggap Cina dengan UU Anti Pemisahan dianggap mengancam proses demokratisasi di kawasan Asia, stabilitas kawasan, serta merusak perdamaian yang sudah terjalin.

Berbagai pernyataan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun rakyat memang belum membuahkan hasil yang nyata. Sementara itu, berbagai jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai Universitas di Taiwan menunjukkan dukungan terhadap diteruskannya keadaan status quo di Selat Taiwan, sembari mencari penyelesaian atas kasus tersebut. Dukungan untuk merdeka ataupun unifikasi hanya berkisar 2% - 4% saja. Tentunya pemerintah juga tidak akan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan melawan RRC. Sedangkan kedua belah pihak harus sama-

sama mencari penafsiran keadaan status quo untuk Selat Taiwan karena baik Cina maupun Taiwan mempunyai penafsiran atau interpretasi sendiri mengenai hal tersebut. Cina menafsirkan status quo yaitu Kepulauan Taiwan merupakan kekuasaan pemerintah RRC yang berkuasa, dan karenanya pemerintahan Taiwan tidak sah. Sedangkan Taiwan menafsirkan status quo sebagai keadaan yang memang sudah berlangsung selama ini, dalam arti mereka belum akan memproklamkan kemerdekaan maupun menerima tawaran unifikasi. Sementara itu hubungan yang terjalin diantara kedua belah pihak sudah seharusnya dibiarkan apa adanya. Hubungan ekonomi investasi, hubungan antara keluarga yang terpisah dan sebagainya. Respon akan hal ini sudah mulai menemui titik terang dengan dibukanya jalur penerbangan sewaan dari Taiwan ke daratan pada tahun 2005 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alatas, Ali, *A Voice for A Just Peace*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta kerjasama Institute of Southeast Asian Studies Singapore.

Dougherty, James, *Contending Theories of International Relations*, Harper Collins Publishers, New York, 1990

Plano, Jack C and Olton, Roy, *The International Dictionary*, Holt Rinehart, Winston inc., Western Michigan University, New York, 1973

Mas'oed., Mochtar, *Studi Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi*, PAU-Studi Sosial, Yogyakarta, 1989

_____, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3ES, 1990.

_____, *Studi Hubungan Internasional, tingkat analisis dan teorisasi*, PAU-Studi Sosial, Yogyakarta, 1989

Warsito, Tulus, *Teori-teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Surat Kabar:

Kompas, 7 Maret 2005

Kompas, 11 Oktober 2007

Kompas, 24 Agustus 2007

Situs Internet:

www.wikipedia.com/Taiwan-China/relations ; access date: November 2006

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Republik_China&printable=yes ; access date: November 2006

Yan, Li Yong, China, One System, two Chinas, Asia Times Online Ltd; 2004. retrieved from www.wikipedia.com ; access date: March 21st 2007

[wikipedia.com/ military](http://wikipedia.com/military) of Taiwan; access date: June 6th 2007 11:55 pm

Wikipedia.com/political status of Taiwan; access date: February 11th 2007 7:55pm

The Office of the President of the Republic of China

www.Wikipedia.com/PRC-RoC relations; date taken 25 Mei 2005

Wikipedia.com/political status of Taiwan; access date: February 11th 2007

www.mac.gov.tw/strait-relation polling

Yan, Li Yong, China, One System, two Chinas, Asia Times Online Ltd; 2004. from

www.wikipedia.com ; access date: March 21st 2007

www.wikipedia.com/Anti-Secession Law of the People's Republic of China; access date: November 2005

<http://www.china.org.cn/chinese/zhuanti/ffl/810447.htm> ; access date 30 Januari 2007

Kapanlagi.com access date: Maret 2006

The Office of the President of the Republic of China Published: March 14, 2005

Source: Mainland Affairs Council

President Chen's Videoconference with Members of the European Parliament

Published: March 1, 2005 Source: The Office of the President of the Republic of China

www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2005-03-14-8 access date March 2005

Published: March 26, 2005 Source: Mainland Affairs Council

Public opinion on Cross-Strait relations in the Republic of China, MAC, Executive Yuan, Dec 2006. www.mac.gov.tw

<http://www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp>

Public opinion on Cross-Strait relations in the Republic of China, MAC, Executive Yuan, Dec 2006. www.mac.gov.tw

U.S. Defense Ministry's 2005 Report on the Military Power of the People's Republic of China

LAMPIRAN

Lampiran I
Perbandingan statistik Taiwan dan RRC

<i>A Statistical Comparison</i>		
TAIWAN Formally known as the Republic of China		CHINA Formally known as the People's Republic of China
13,969 square miles ¹	<i>Land area</i>	3,706,566 square miles ²
22.42 million ¹	<i>Population</i>	1.27 billion ²
Democracy ³	<i>Type of government</i>	Communist Party-led state ³
Free (1.5) ⁴	<i>Human rights condition</i>	Not free (6.5) ⁴
US\$12,941 ¹	<i>Per capita GNP</i>	US\$840 ²
US\$230.1 billion ¹	<i>Foreign trade</i>	US\$509.8 billion ²
US\$132.9 billion ¹ (April 2002)	<i>Foreign exchange reserves</i>	US\$233.8 billion ² (April 2002)
US\$34.33 million ¹	<i>Foreign debt</i>	US\$170.1 billion ²
7th / 75 ⁵	<i>Global growth competitiveness</i>	39th / 75 ⁵
5th / 50 ⁶	<i>Investment climate</i>	21st / 50 ⁶
96.6% ⁷	<i>Mobile phone penetration rate</i>	11.2% ⁷
5,371 ⁸	<i>US utility patent grants</i>	195 ⁸

Lampiran II
Tabel Kapabilitas Militer Taiwan

Republic of China Military	
Military manpower	
Usia Militer	19 tahun
Tersedia	Laki-laki usia 19-35: 5,883,828 (2005 est.)
Yang masuk Wajib Militer	Laki-laki 4,749,537 (2005 est.)
Pencapaian usia Wamil per tahun	Laki-laki: 174,173 (2005 est.)
Pasukan aktif	290,000 (<u>Ranked 17th</u>)
Total	1,965,000 (<u>Ranked 9th</u>)
Pembelanjaan Militer	
Dalam Dollar	\$8.4 billion (2006)
Percent of GDP	2.2% (2006)

Sumber: <http://en.wikipedia.org/w/index.php>

Lampiran III
Peta Geografis Republik Cina (Taiwan)



Lampiran IV
Peta Geografis Republik Rakyat Cina

